

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang.

Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia dan seluruh masyarakat Indonesia, mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pelaksanaan pembangunan idealnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam artian sejahtera jasmani dan rohani. Ruang lingkup kehidupan yang sejahtera menyangkut banyak variabel antara lain variabel ekonomi, variable social demografi, variable politik dan variable kejiwaan. Variabel variabel tersebut juga akan berkaitan dengan penghasilan dan peluang memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia , keamanan berusaha, politik serta kondisi bahagia berketenteraman .Untuk mencapai hal tersebut maka upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat secara konprehensif dan berkeseimbangan tetap harus terus dilakukan.

Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan sebagaimana tersebut di atas memerlukan perencanaan yang mengintegrasikan berbagai aspek yaitu aspek social, ekonomi, kependudukan dan lingkungan. Aspek kependudukan harus menjadi titik sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena tanpa memperhatikan pembangunan kependudukan akan menyebabkan kerugian dengan berkurangnya keuntungan ekonomi untuk membiayai penduduk. Oleh sebab itu pelaksanaan pembangunan segala sektor untuk penduduk perlu memperhatikan perkembangan

penduduk baik menyangkut kuantitas, kualitas maupun persebarannya disuatu wilayah. Dengan kata lain, pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan karakteristik penduduk yang berada pada wilayah itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa dalam perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan dengan program (SIAK) dan tersimpan didalam data base kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengembangan pendataan dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan bahwa perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam rangka menciptakan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya tampung dan daya dukung lingkungannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional secara berkelanjutan. Pasal 49 dan 50 Undang-Undang 52 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa :

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.

2. Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga.
3. Data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.
4. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan dan mengembangkan system informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan.
5. Pemerintah daerah wajib melaporkan data dan informasi kependudukan dan keluarga kepada Pemerintah.
6. Pemerintah wajib menyebarluaskan kembali data dan informasi yang terkumpul pada tingkat nasional untuk dipisah-pisahkan dan dianalisis untuk keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antar daerah dalam bentuk laporan neraca kependudukan dan pembangunan.

Dari penjabaran diatas terlihat bahwa penduduk merupakan modal dasar dan faktor dominan pembangunan, oleh karenanya penduduk harus menjadi titik central pembangunan berkelanjutan. Sejalan hal tersebut maka data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan baik bagi pemerintah maupun pihak swasta dan masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi kependudukan dengan kewenangan antara lain mengelola dan menyajikan data kependudukan sesuai tingkatannya. Dengan demikian data base tersebut perlu dikelola

dan disajikan untuk dapat memberikan informasi kependudukan kepada pengguna, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan dan berkelanjutan.

Melalui sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) daerah dapat menyediakan data kualitas penduduk berupa jumlah penduduk. Selanjutnya data kualitas dan kuantitas penduduk tersebut dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk berbagi kepentingan misalnya penyusunan profil kependudukan, perumusan kebijakan, analisa kebijakan dan perencanaan dibidang kependudukan.

Pemerintah Kabupaten Buleleng sejak tahun 2009 sudah menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan telah menghasilkan database kependudukan.

Database setelah diurai dan diolah berdasarkan karakteristik demografi, social penduduk dan Kepala Keluarga dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi dan karakteristik penduduk Kabupaten Buleleng sehingga sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengetahui karakteristik penduduk Kabupaten dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Penyusunan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Buleleng ini menggunakan data base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kurun waktu 1 januari 2013 hingga 31 Desember 2013. Database yang berisi data penduduk agregat dengan berbagai elemen informasi kependudukan diolah, ditabulasikan dan dianalisa dari aspek kuantitas dan kualitas penduduk. Hal tersebut dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Buleleng

memiliki data yang lebih rinci , valid dan dapat dipercaya tentang gambaran kondisi kependudukan Kabupaten Buleleng. Disamping itu untuk memperkaya materi penyajian data dalam profil ini juga menggunakan data – data yang berasal dari instansi lainnya seperti dari Kantor Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng, Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan profil perkembangan kependudukan ini adalah untuk memberikan informasi tentang data-data kependudukan dan perkembangannya yang akan bermanfaat untuk bahan perumusan kebijakan kependudukan, perencanaan kependudukan, penentuan target, sasaran dan program pembangunan serta kebijakan lainnya di Kabupaten Buleleng.

1.3. Ruang Lingkup

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Buleleng ini disusun dengan ruang lingkup meliputi kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk serta kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil penduduk kabupaten Buleleng berdasarkan database yang ada pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kurun waktu tanggal 1 Januari 2013 hingga tanggal 31 Desember 2013 pukul 17.00 Wita sesuai dengan

maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, yang dipertegas kembali dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474/8458/MD.tanggal 20 Desember 2012 tentang penyusunan profil perkembangan kependudukan.

1.4. Pengertian Umum Terhadap Istilah Yang Digunakan Dalam Profil Perkembangan Kependudukan.

Dalam profil perkembangan kependudukan ini digunakan beberapa istilah, dan untuk memudahkan pemahamannya berikut disampaikan pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam profil perkembangan kependudukan ini antara lain :

- 1) Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat Tinggal di Wilayah Kabupaten Buleleng.
- 2) Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kuantitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social, budaya, agama serta lingkungan penduduk kabupaten Buleleng.
- 3) Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Buleleng yang berkelanjutan.
- 4) Data Kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang berstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

- 5) Angkatan Kerja adalah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan (menganggur) atau terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.
- 6) Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.

Kecamatan Gerokgak memiliki pantai terpanjang diantara kecamatan-kecamatan lain, panjang pantainya mencapai 76,89 km.

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 136.588 hektar atau 24,25 % dari luas Propinsi Bali. Kec. Gerokgak merupakan kecamatan terluas, yakni 26,11% dari luas kabupaten, sedangkan kecamatan yang memiliki luas paling kecil adalah Kec. Buleleng, yaitu 3,44 % .

Sebagian besar wilayah kabupaten Buleleng merupakan daerah berbukit yang membentang dibagian selatan, sedangkan di bagian utara yakni sepanjang pantai merupakan dataran rendah. Diantara perbukitan tersebut terdapat beberapa gunung yang sudah tidak aktif. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Tapak (1903 meter) berada di Kec. Sukasada, sementara yang paling rendah adalah Gunung Jae (222 m) berada di wilayah Kec. Gerokgak (Tabel 1.1.8). Selain itu Kabupaten Buleleng juga mempunyai banyak sungai besar & kecil, sebagian diantaranya merupakan sungai tadah hujan .Dua buah danau juga berada di daerah ini, yaitu Danau Tamblingan (110 hektar) berada di wilayah Kec. Banjar dan Danau Buyan (360 hektar) terletak di Kec. Sukasada.

Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, Kabupaten Buleleng hanya mengenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni - September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember - Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober –November. Curah hujan setahun di Kabupaten Buleleng bervariasi tiap bulan. Data curah hujan tahun 2012 tertinggi berada

pada bulan Januari, dan terendah pada bulan Juni, sedangkan sepanjang bulan Agustus hingga September tidak terjadi hujan.

2.2. Wilayah Administrasi

Kabupaten Buleleng dengan luas wilayah 1.365,88 Km² terbagi dalam wilayah-administrasi Kecamatan, Desa/Kelurahan ,Dusun/ Banjar , Lingkungan dan Desa Pakraman dengan rincian sebagaimana tertuang dalam tabel 1.

Berdasar data pada table 1 diperoleh informasi bahwa di kabupaten Buleleng secara administrasi ada 9 kecamatan, 129 desa, 19 kelurahan, 546 banjar, 63 lingkungan dan 166 desa pakraman.

Tabel 1 : Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Buleleng, Tahun 2013

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun/ Banjar	Lingkungan	Desa Pakraman
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gerokgak	14	0	75	0	13
2	Seririt	20	1	80	5	25
3	Busungbiu	15	0	41	0	16
4	Banjar	17	0	71	0	17
5	Sukasada	14	1	63	5	20
6	Buleleng	12	17	41	53	21
7	Sawan	14	0	69	0	17
8	Kubutambahan	13	0	46	0	22
9	Tejakula	10	0	60	0	15
	Kab.Buleleng	129	19	546	63	166

Sumber : Buleleng Dalam Angka, 2013.

2.3. Kondisi Demografis

Penduduk sebagaimana pada sebuah wilayah pemerintahan merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang paling vital. Penduduk Kabupaten Buleleng pada tahun 2013 tercatat sebanyak 805.723 orang yang terdiri dari 400.963 orang penduduk laki-laki dan 400.760 orang penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,09.

Dari segi persebaran penduduk, penduduk kabupaten Buleleng terbanyak yaitu 17,90 % berada di wilayah Kecamatan Buleleng, dan kecamatan Busungbiu merupakan daerah yang paling sedikit penduduknya. Dominannya penduduk berada di kecamatan Buleleng disebabkan karena kecamatan Buleleng merupakan pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, sosial, budaya dan lain-lainnya. Kondisi tersebut juga menyebabkan wilayah Kecamatan Buleleng menjadi daerah yang terpadat penduduknya yaitu sebanyak 3.074 jiwa /km². Sementara itu tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu sebanyak 304 jiwa / km² juga berada di wilayah kecamatan Gerokgak.

Jumlah tenaga kerja yang besar akan menimbulkan masalah apabila tidak mampu dikelola dengan baik. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka. Tingginya angka pengangguran akibat tidak tertampungnya mereka ke dalam sektor-sektor usaha kadang-kadang menimbulkan masalah sosial yang mengarah pada tindakan bersifat negatif.

Berdasarkan data hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk selama tahun 2013, jumlah tenaga kerja di Kabupaten Buleleng tercatat sebanyak 548.199 orang. Dari

jumlah tersebut yang merupakan angkatan kerja sebanyak 416.940 orang dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 131.257 orang. Jumlah angkatan kerja yang bekerja mencapai 365.309 orang dan sebanyak 51.631 orang atau 12,38 % tidak bekerja atau menganggur.

2.4. Gambaran ekonomi daerah.

Kabupaten Buleleng dengan topografis wilayah nyegara gunung memiliki potensi ekonomi berupa potensi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, industry, pariwisata budaya, alam dan spiritual serta aneka jasa tersier lainnya yang diharapkan dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto. PDRB dibedakan menjadi dua yaitu PDRB sektoral yang merupakan nilai tambah yang tercipta dalam setiap sektor usaha di suatu wilayah pada periode waktu tertentu dan PDRB penggunaan atau konsumsi yang merupakan pengeluaran akhir berbagai produk barang dan jasa untuk konsumsi akhir, investasi fisik dan ekspor neto di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.

PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku tahun 2012 besarnya 9.115.717,85 juta rupiah dan 3.907.935,78 juta rupiah atas dasar harga konstan. Secara nominal nilai PDRB tahun 2012 baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Dari tahun ke tahun sektor pertanian masih merupakan sektor paling dominan dalam kontribusinya terhadap pembentukan PDRB di Kabupaten Buleleng. Namun pada tahun ini tidak lagi. Kontribusi sektor ini mencapai 22,70 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor yang kontribusinya tertinggi mencapai 30,17 persen. Kegiatan pariwisata mempunyai peranan penting dalam perkembangan sektor ini.

Sektor yang mempunyai kontribusi paling kecil terhadap pembentukan PDRB di Kabupaten Buleleng adalah pertambangan penggalan, yaitu hanya 0,66 persen, tercatat laju pertumbuhan PDRB tahun 2012 di Kabupaten Buleleng adalah sebesar 6,52 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB tahun sebelumnya yang mencapai 6,11 persen. Secara umum naiknya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng sangat dipengaruhi oleh peningkatan kinerja sektor pertanian, terlebih sektor ini mempunyai kontribusi paling besar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Buleleng. Turut pula memberi andil pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yakni tumbuhnya nilai tambah sektor Perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor Jasa-jasa.

BAB III

SUMBER DAN JENIS DATA

3.1. Sumber Data

Sumberdata yang digunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Buleleng Tahun 2013 ini adalah sebagai berikut :

- 1). Data registrasi :
 - a). Data yang dihasilkan dari pencatatan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mulai akhir Januari 2013 sampai dengan akhir bulan Desember 2013 pukul 17.00 (Sesuai dengan pasal 12 Permendagri Nomor 65 Tahun 2010).
 - b). Data registrasi hasil Sidak Penduduk Pendetang Tinggal Sementara oleh Tim Sidak Gabungan dan hasil Pendataan oleh Tenaga Pengawas Penduduk Pendetang dari bulan Januari s/d Desember 2013.
- 2). Data non registrasi yaitu data dari BPS Kabupaten Buleleng
- 3). Data dari lintas sector, yaitu data yang bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng;

3.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Buleleng Tahun 2013 ini adalah sebagai berikut :

- 1). Data Primer .

Dalam profil ini adalah data yang diperoleh dari hasil pelaksanaan registrasi langsung pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama tahun 2013 melalui Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) dan data hasil Sidak Penduduk Pendetang Tinggal Sementara oleh Tim Sidak Gabungan dan hasil Pendataan oleh Tenaga Pengawas Penduduk Pendetang dari bulan Januari s/d Desember 2013..

Jenis data yang dihasilkan dari database SIAK antara lain :

- a) Jumlah penduduk kabupaten Buleleng dan kecamatan;
- b) Jumlah penduduk kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut jenis kelamin
- c) Jumlah penduduk kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut status kawin
- d) Jumlah penduduk kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut pendidikan
- e) Jumlah penduduk kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut agama
- f). Jumlah penduduk kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut kecacatan;
- g). Jumlah penduduk kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut pekerjaan
- h). Jumlah Kepala Keluarga kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut jenis kelamin
- i). Jumlah Kepala Keluarga kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut status kawin;
- j). Jumlah Kepala Keluarga kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut pendidikan;
- k). Jumlah Kepala Keluarga kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut umur;
- l). Jumlah Kepala Keluarga kabupaten Buleleng dan kecamatan menurut status bekerja;
- k). Jumlah penduduk masuk dan keluar kabupaten Buleleng.

Jenis data yang dihasilkan dari Sidak Penduduk Pendetang Tinggal Sementara oleh Tim Sidak Gabungan dan hasil Pendataan oleh Tenaga Pengawas Penduduk Pendetang dari bulan Januari s/d Desember 2013 antara lain :

- a). Jumlah penduduk pendatang;
- b). Jumlah dan jenis pelanggaran administrasi kependudukan penduduk pendatang.

2). Data Sekunder.

Data sekunder dalam profil ini adalah data yang diperoleh dari instansi lintas sektoral seperti BPS Kab.Buleleng, data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, data dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng dan data yang diperoleh dari hasil pengolahan data base SIAK Disdukcapil Kabupaten Buleleng.

Jenis data yang digunakan antara lain :

- a) Jumlah kelahiran hidup kabupaten Buleleng dirinci per kecamatan;
- b) Jumlah kematian bayi kabupaten Buleleng dirinci per kecamatan;
- c) Rasio anak dan perempuan
- d) Angka Kematian Anak Balita
- e) Angka Kematian Ibu
- f) Angka Melek Huruf (AMH)
- g) Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan
- h) Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan
- i). Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten dirinci per kecamatan;

- j). Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten menurut jenis kelamin;
- k). Jumlah Angkatan Kerja
- l). Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)
- m). Jumlah penduduk menurut pekerjaan
- n). Jumlah pengangguran terbuka
- o). Migrasi Netto
- p). Jumlah dan proporsi kepemilikan Kartu Keluarga (KK);
- q). Jumlah dan proporsi kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- r). Jumlah dan proporsi kepemilikan Akta Kelahiran
- s). Jumlah dan proporsi kepemilikan Akta Kematian
- t). Jumlah dan proporsi kepemilikan Akta Perkawinan
- u). Jumlah dan proporsi kepemilikan Akta Perceraian
- v). Laju Pertumbuhan Penduduk
- w). Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS).
- x). Data potensi daerah.

BAB IV

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

4.1. Kuantitas Penduduk

Informasi tentang jumlah penduduk sangat penting diketahui terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal disuatu wilayah pada waktu tertentu. Jumlah penduduk disuatu wilayah dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah penduduk), disisi lain dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Disamping itu jumlah penduduk dipengaruhi oleh migrasi penduduk. Imigrasi (pendatang) akan menambah jumlah penduduk, emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh tiga komponen demografi, yaitu Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi penduduk. Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut dengan perubahan reproduktif (reproductive change) atau pertumbuhan alamiah (Natural Growth), sedangkan selisih antara migrasi masuk dengan migrasi keluar disebut dengan Migrasi Netto (Net Migration).

4.1.1. Jumlah dan Persebaran Penduduk.

Pada tahun 2013 Kabupaten Buleleng mempunyai jumlah penduduk sebanyak 805.723 jiwa yang terdiri dari 400.963 penduduk laki-laki dan 404.760 penduduk perempuan. Penduduk tersebut menyebar di 9 (Sembilan) wilayah Kecamatan. Jumlah dan distribusi penduduk Kabupaten Buleleng berdasarkan kecamatan dapat diketahui pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2013 menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.

Kec	LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Grogak	49,316	49.87	49,566	50.13	98,882	12.27
Seririt	52,484	49.51	53,526	50.49	106,010	13.16
Busungbiu	29,603	49.44	30,269	50.56	59,872	7.43
Banjar	46,968	49.93	47,095	50.07	94,063	11.67
Sukasada	39,167	49.51	39,944	50.49	79,111	9.82
Buleleng	71,916	49.84	72,389	50.16	144,305	17.91
Sawan	39,930	49.40	40,893	50.60	80,823	10.03
Kubutambahan	30,777	49.68	31,168	50.32	61,945	7.69
Tejakula	40,802	50.55	39,910	49.45	80,712	10.02
KAB. BULELENG	400,963	49.76	404,760	50.24	805,723	100.00

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng, Desember 2013, Diolah.

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa wilayah kecamatan Buleleng mempunyai jumlah penduduk paling banyak yaitu 144.305 orang atau 17,91 % dari jumlah penduduk kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan karena wilayah kecamatan Buleleng adalah wilayah pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, sosial, budaya dan lain-lainnya sehingga pembangunan perkantoran, perumahan, perdagangan, transportasi dan demikian juga penduduk Kabupaten Buleleng terutama penduduk pendatangnya lebih memilih berdomisili di wilayah kecamatan Buleleng. Sebaliknya kecamatan Busungbiu memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 59.872 jiwa atau 7,43 % dari jumlah

penduduk keseluruhan. Hal ini disebabkan karena wilayah Kecamatan Busungbiu merupakan daerah perbukitan.

4.1.2. Kepadatan Penduduk (Population Density Ratio)

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ketahun diakibatkan oleh perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah baik karena perubahan alami maupun karena perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk mengetahui kerapatan jumlah penduduk dalam satu kesatuan ruang.

Angka kepadatan penduduk mencerminkan banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tertentu. Rasio Kepadatan Penduduk (Population Density Ratio) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$D = \frac{P}{A}$$

dimana D : Rasio Kepadatan Penduduk, P: Jumlah penduduk (jiwa) dan A : Luas Wilayah (km²).

Berdasarkan data pada tabel 3 diperoleh informasi bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Buleleng pada tahun 2013 mencapai 589,89 orang/km². Ini berarti bahwa dalam setiap kilometer persegi wilayah di Kabupaten Buleleng dihuni dengan penduduk kurang lebih sebanyak 590 orang. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, ternyata Buleleng memiliki rasio kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu sebesar

Tabel 3. Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2013

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
	2013	Km ²	
1	2	3	4
Gerokgak	98,882	356.57	277.31
Seririt	106,010	111.78	948.38
Busungbiu	59,872	196.62	304.51
Banjar	94,063	172.60	544.98
Sukasada	79,111	172.93	457.47
Buleleng	144,305	46.94	3,074.24
Sawan	80,823	92.52	873.57
Kubutambahan	61,945	118.24	523.89
Tejakula	80,712	97.68	826.29
Kab.Buleleng	805,723	1,365.88	589.89

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng,2013 Diolah.

3.074 orang/ km² disusul masing-masing oleh kecamatan Seririt dengan kepadatan sebesar 984,38 orang /km², kecamatan Sawan dengan kepadatan sebesar 873,57 orang /km², kecamatan Tejakula dengan kepadatan sebesar 826,297 orang /km², kecamatan Banjar dengan kepadatan sebesar 544,98 orang /km², kecamatan Kubutambahan dengan kepadatan sebesar 523,89 orang /km², kecamatan Sukasada dengan kepadatan sebesar 457,47 orang /km², kecamatan Busungbiu dengan kepadatan sebesar 304,51 orang /km², dan kecamatan Gerokgak dengan kepadatan sebesar 277,31 orang /km²,

4.1.3. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada

waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan proyeksi jumlah penduduk di masa depan. Angka pertumbuhan penduduk dihitung dengan rumus :

$$P_t = P_o \cdot e^{rt}$$

dimana :

- P_t : jumlah penduduk pada tahun t
- P_o : jumlah penduduk pada tahun dasar / awal (o)
- r : Angka pertumbuhan penduduk
- t : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t
- e : Fungsi eksponensial = 2,7182818

Berdasarkan data pada tabel 4 angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buleleng dari tahun 2010 hingga tahun 2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 – 2011 pertumbuhannya mencapai 1,90 %, tahun 2011 -2012 meningkat menjadi 2,68 % dan pada tahun 2012 – 2013 meningkat dengan tajam dengan laju pertumbuhan sebesar 4,01 %.

Jika diamati per kecamatan, pertumbuhan penduduk tertinggi tahun 2012-2013 terjadi di kecamatan Buleleng yang mencapai angka 9,66 % disusul kecamatan Kubutambahan, Busungbiu dan Seririt. Tingginya pertumbuhan penduduk di kecamatan Buleleng dapat dijadikan petunjuk bahwa kegiatan ekonomi, pendidikan, pemerintahan dan sector jasa-jasa lainnya di wilayah tersebut sedang menggeliat sehingga menjadi daya tarik penduduk untuk berdomisili. Sementara itu penyebab laju pertumbuhan

penduduk yang tinggi di kecamatan Kubutambahan perlu dilakukan analisa /penelitian lebih lanjut.

Tabel 4. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2010 – 2013

No	KECAMATAN	Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)		
		2010-2011	2011-2012	2012-2013
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gerokgak	3,95	2,85	1,34
2	Seririt	3,31	-0,62	3,52
3	Busungbiu	3,23	6,64	3,76
4	Banjar	0,39	11,42	2,63
5	Sukasada	2,13	1,67	2,27
6	Buleleng	0,58	1,55	9,66
7	Sawan	2,42	1,05	1,31
8	Kubutambahan	0,88	0,49	8,16
9	Tejakula	0,89	1,74	0,63
	Kabupaten Buleleng	1,90	2,68	4,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng dari Hasil Registrasi Penduduk, Diolah 2013.

4.1.4. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku social ekonomi. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin. Distribusi penduduk menurut umur dikelompokkan menurut umur satu tahunan atau umur tunggal (single age) dan lima tahunan, namun dapat juga dikelompokkan menurut distribusi umur tertentu sesuai dengan kebutuhan seperti pengelompokkan penduduk menurut usia sekolah (SD = 7 s/12 tahun; SLTP = 13 – 15 tahunan; SLTA = 16 – 18 tahunan; dan perguruan tinggi = 19 -24 tahunan).

Selain pengelompokan berdasarkan distribusi umur penduduk, terdapat juga pengelompokan penduduk berdasarkan struktur umur penduduk yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yaitu :

- Penduduk usia muda yaitu penduduk usia dibawah usia 15 tahun atau kelompok umur 0 – 14 tahun.
- Penduduk usia produktif yaitu penduduk umur 15 – 59 tahun
- Penduduk usia lanjut yaitu penduduk umur 60 tahun ke atas (mengikuti ketentuan WHO)

Struktur penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk disuatu wilayah tersebut kelompok umur muda atau tua. Penduduk suatu wilayah dianggap penduduk muda apabila jumlah penduduk yang berumur dibawah 15 tahun mencapai sebesar 40% atau lebih. Suatu daerah yang mempunyai karakteristik penduduk muda membutuhkan investasi social ekonomi yang berbeda dengan investasi untuk kelompok umur tua. Kelompok umur muda membutuhkan fasilitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya, sementara kelompok umur tua tidak membutuhkan fasilitas pendidikan, tetapi fasilitas untuk ketenagakerjaan, kesehatan, kebutuhan social dan lain sebagainya. Indikator yang menunjukkan komposisi penduduk menurut karakteristik demografi adalah :

- Umur Median (Median Age)
- Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
- Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan (Depedency Ratio).

4.1.4.1. Umur Median (Median Age)

Umur Median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian pertama yang lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur media. Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Berdasarkan umur median ini penduduk disuatu daerah dikategorikan :

- Penduduk muda, jika umur media kurang dari 20 tahun;
- Penduduk intermediate, jika umur media antara 20 – 30 tahun;
- Penduduk tua, jika umur media lebih dari 30 tahun.

Untuk menghitung umur media adalah dengan menggunakan rumus :

$$\text{Umur Median (Md)} = I_{Md} + \left[\frac{\frac{N}{2} - f_x}{f_{Md}} \right] \times i$$

I_{Md} = Batas bawah kelompok umur yang mengandung N/2

N = *jumlah penduduk total*

f_x = Jumlah penduduk kumulatif sampai dengan kelompok umur yang Mengandung N/2

f_{Md} = Jumlah penduduk pada kelompok umur dimana terdapat nilai N/2

I = Kelas interval umur (5 tahun).

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng Berdasarkan Kelompok Umur Lima Tahunan Tahun 2013

Kelompok Umur		Jumlah Penduduk Penduduk	Kumulatif fx	% Kumulatif
1		2	4	5
0-4	Tahun	49,114	49,114	6.10
5-9	Tahun	73,365	122,479	15.20
10-14	Tahun	71,933	194,412	24.13
15-19	Tahun	63,647	258,059	32.03
20-24	Tahun	66,389	324,448	40.27
25-29	Tahun	69,023	393,471	48.83
30-34	Tahun	73,816	467,287	58.00
35-39	Tahun	65,109	532,396	66.08
40-44	Tahun	60,108	592,504	73.54
45-49	Tahun	50,837	643,341	79.85
50-54	Tahun	43,019	686,360	85.19
55-59	Tahun	34,642	721,002	89.49
60-64	Tahun	26,696	747,698	92.80
65-69	Tahun	20,283	767,981	95.32
70-74	Tahun	17,730	785,711	97.52
>75	Tahun	20,012	805,723	100.00
Total		805,723		

Data Base Disdukcapil Kab. Buleleng, Tahun 2013, diolah.

Dengan menggunakan data pada tabel 5 dan dilakukan analisa/ perhitungan sesuai rumus tersebut di atas didapatkan umur median (Md) penduduk Kabupaten Buleleng pada tahun 2013 adalah sebesar 30,64 (dibulatkan menjadi 31 tahun). Angka tersebut berarti bahwa selama tahun 2013 setengah dari penduduk di kabupaten Buleleng berusia dibawah umur 31 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 31 tahun. Umur Median tersebut terletak diantara 30-40 tahun, sehingga penduduk di Kabupaten Buleleng dikategorikan sebagai **penduduk tua**. Hal tersebut tentunya menarik untuk dikaji apalagi jika kita amati dalam keseharian terlihat bahwa penduduk muda seakan

dominan di Kota Singaraja . Dugaan sementara hal tersebut disebabkan karena Kota Singaraja memang merupakan kota pendidikan dengan murid/siswa/mahasiswa yang berasal dari berbagai kabupaten di Bali, tetapi mereka-mereka tersebut KTP atau pendaftaran penduduknya tetap di daerah asalnya sehingga mereka hanya merupakan penduduk pendatang tinggal sementara. Dilain pihak tidak bias dipungkiri bahwa banyak dari penduduk produktif kabupaten Buleleng pergi merantau bersama istri dan anaknya dan menetap ke wilayah Bali selatan sehingga yang tertinggal di kabupaten Buleleng adalah penduduk yang tergolong sudah tua.

4.1.4.2. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Rasio jenis kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Informasi tentang rasio jenis kelamin dapat disajikan menurut kelompok umur maupun wilayah dalam bentuk tabel maupun grafik. Informasi ini dapat berguna untuk perencanaan pembangunan berwawasan gender.

Rasio jenis kelamin dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$RJK = \left(\frac{\sum L}{\sum P} \right) \times K$$

Dimana :

RJK = Rasio Jenis Kelamin

$\sum L$ = Jumlah penduduk Laki-laki

$\sum P$ = Jumlah penduduk Perempuan

K = Konstanta= 100 penduduk perempuan.

Tabel 6. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Penduduk Kabupaten Buleleng berdasarkan kelompok umur Desember Tahun 2013

No	KELOMPOK UMUR	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RJK
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0-4 Tahun	25,382	23,732	49,114	106.95
2	5-9 Tahun	37,899	35,466	73,365	106.86
3	10-14 Tahun	36,745	35,188	71,933	104.42
4	15-19 Tahun	32,470	31,177	63,647	104.15
5	20-24 Tahun	32,843	33,546	66,389	97.90
6	25-29 Tahun	34,073	34,950	69,023	97.49
7	30-34 Tahun	37,638	36,178	73,816	104.04
8	35-39 Tahun	33,041	32,068	65,109	103.03
9	40-44 Tahun	30,217	29,891	60,108	101.09
10	45-49 Tahun	24,415	26,422	50,837	92.40
11	50-54 Tahun	20,855	22,164	43,019	94.09
12	55-59 Tahun	16,386	18,256	34,642	89.76
13	60-64 Tahun	12,710	13,986	26,696	90.88
14	65-69 Tahun	9,181	11,102	20,283	82.70
15	70-74 Tahun	8,289	9,441	17,730	87.80
16	>75 Tahun	8,819	11,193	20,012	78.79
		400,963	404,760	805,723	99.06

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng, Desember 2013, Diolah

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2013 berdasarkan data yang tertuang pada tabel 6 adalah sebesar 99,06 yang berarti bahwa dari setiap 100 orang penduduk perempuan di Kabupaten Buleleng terdapat sebanyak 99 orang penduduk laki-laki. Walaupun secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, namun jika rasio jenis kelamin dilihat berdasarkan kelompok umur 0 – 19 tahun, demikian juga pada kelompok umur 30 – 44 tahun jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk

perempuan. Dari tabel 6 di atas juga diperoleh informasi bahwa mulai kelompok umur interval 45-49 tahun ke atas, jumlah penduduk laki-lakinya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuannya. Dari angka-angka tersebut tentunya merupakan informasi kependudukan yang sangat menarik terutama jika dikaitkan dengan penyusunan perencanaan pembangunan di kabupaten Buleleng yang harus memperhatikan kaum gender.

Tabel 7. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Buleleng Berdasarkan Kecamatan Tahun 2013

Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		RJK
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	
1	2	3	4	5	6
Gerokgak	49,316	12.30	49,566	12.25	99.50
Seririt	52,484	13.09	53,526	13.22	98.05
Busungbiu	29,603	7.38	30,269	7.48	97.80
Banjar	46,968	11.71	47,095	11.64	99.73
Sukasada	39,167	9.77	39,944	9.87	98.05
Buleleng	71,916	17.94	72,389	17.88	99.35
Sawan	39,930	9.96	40,893	10.10	97.65
Kubutambahan	30,777	7.68	31,168	7.70	98.75
Tejakula	40,802	10.18	39,910	9.86	102.24
Total	400,963	100.00	404,760	100.00	99.06

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng,2013,Diolah

Data rasio jenis kelamin juga disajikan berdasarkan kecamatan. Berdasarkan data pada table 7 rasio jenis kelamin per kecamatan di Kabupaten Buleleng kecuali kecamatan Tejakula angka sex rasionya lebih kecil dari 100. Mengingat rasio jenis kelamin penduduk pada 8 (delapan) kecamatan kecuali kecamatan Tejakula angkanya berada dibawah angka 100 dan kecenderungan tersebut mulai tampak pada struktur umur 49

tahun ke atas. maka penyusunan kebijakan pembangunan yang berwawasan gender untuk hampir semua kecamatan di kabupaten Buleleng menjadi sangat penting. Hal ini capai sasaran yang optimal.

4.1.4.3. Rasio Ketergantungan (Dependency ratio)

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (**Dependency ratio**) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif. Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan dapat dibedakan menjadi Rasio Ketergantungan Muda (RK_{muda}), Rasio Ketergantungan Tua (RK_{tua}) dan Rasio Ketergantungan Total (RK_{total}) dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$RK_{muda} = \frac{P_{0-14}}{P_{15-64}}$	RK_{muda} = Rasio Ketergantungan Penduduk usia muda
$RK_{tua} = \frac{P_{65+}}{P_{15-64}}$	RK_{tua} = Rasio Ketergantungan Penduduk usia tua
$RK_{total} = \frac{(P_{0-14}) + (P_{65+})}{P_{15-64}}$	RK_{total} = Rasio Ketergantungan Penduduk usia muda dan tua
	P_{0-14} = Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun)
	$P_{(65)+}$ = Jumlah penduduk usia tua (65 thn ke atas)
	$P_{(15-64)}$ = Jumlah penduduk usia produktif (15 thn – 64 th)

Guna mengetahui rasio ketergantungan penduduk kabupaten Buleleng di tiap-tiap kecamatan dan berdasarkan jenis kelamin, dibutuhkan data jumlah penduduk kelompok umur 0 – 14 tahun, kelompok umur 15 – 64 tahun dan kelompok umur 65 tahun ke atas per kecamatan dan berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 8. Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2013 berdasarkan kelompok Umur Muda, Produktif dan dirinci menurut Kecamatan.

No	Kecamatan	Kelompok Umur			Jumlah Penduduk
		0-14 Tahun	15-64 Tahun	>=65 Tahun	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Grogak	25,580	67,698	5,604	98,882
2	Seririt	24,202	72,125	9,683	106,010
3	Busungbiu	12,981	41,131	5,758	59,870
4	Banjar	21,609	64,530	7,926	94,065
5	Sukasada	20,930	52,786	5,395	79,111
6	Buleleng	38,366	98,104	7,835	144,305
7	Sawan	19,986	54,690	6,147	80,823
8	Kubutambahan	16,204	41,474	4,267	61,945
9	Tejakula	19,641	55,661	5,410	80,712
	JUMLAH	199,499	548,199	58,025	805,723

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng,2013,Diolah

Tabel 9. Penduduk Kelompok Umur Muda, Produktif dan Tua Kabupaten Buleleng menurut Jenis Kelamin Tahun 2013.

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Kelompok Umur			Muda+Tua
	Muda	Produktif	Tua	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	103,026	271,648	26,289	129,315
Perempuan	98,560	276,551	31,736	130,296
L + P	199,499	548,199	58,025	257,524

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng,2013,Diolah

Berdasarkan data yang tertuang dalam tabel 8 dan table 9 di atas dengan menggunakan rumus $RK_{muda} = \frac{P_{0-14}}{P_{15-64}}$ kemudian $RK_{tua} = \frac{P_{65+}}{P_{15-64}}$ dan $RK_{total} = \frac{(P_{0-14}) + (P_{65+})}{P_{15-64}}$

Selanjutnya dapat diketahui rasio ketergantungan penduduk kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang dalam angka-angka yang tersaji pada table 10 dan 11 berikut ini :

Tabel 10. Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Buleleng Dirinci Berdasarkan Kecamatan Tahun 2013.

NO	KECAMATAN	RASIO KETERGANTUNGAN		
		MUDA	TUA	TOTAL
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Grokgak	37.79	8.28	46.06
2	Seririt	33.56	13.43	46.98
3	Busungbiu	31.56	14.00	45.56
4	Banjar	33.49	12.28	45.77
5	Sukasada	39.65	10.22	49.87
6	Buleleng	39.11	7.99	47.09
7	Sawan	36.54	11.24	47.78
8	Kubutambahan	39.07	10.29	49.36
9	Tejakula	35.29	9.72	45.01
KABUPATEN		36.39	10.58	46.98

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng,2013,Diolah

Tabel 11. Rasio Ketergantungan Penduduk Muda, Tua dan Total Kabupaten Buleleng Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013

Jenis Kelamin	Rasio Ketergantungan		
	Muda	Tua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	36.42	9.57	45.99
Perempuan	33.87	11.39	45.26
Kabupaten	36.39	10.58	46.98

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng,Desember 2013,Diolah

Dari table 10 dan table 11 diketahui bahwa angka rasio ketergantungan penduduk kabupaten Buleleng tahun 2013 adalah sebesar 46,98. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 46 – 47 orang. Jumlah tanggungan tersebut bersumber dari penduduk yang belum produktif sebesar 36 orang dan penduduk yang dianggap sudah tidak produktif lagi sebanyak 10 – 11 orang.

Rasio ketergantungan tertinggi di kabupaten Buleleng terdapat di kecamatan Sukasada yang hamper mendekati angka 50 yang berarti setiap 100 orang penduduk produktif memiliki beban menanggung 50 orang, sementara rasio ketergantungan terendah ada di kecamatan Tejakula.

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, rasio ketergantungan penduduk laki-laki di Kabupaten Buleleng lebih tinggi dibandingkan dengan rasio ketergantungan penduduk perempuan. Keadaan sebaliknya terlihat pada rasio ketergantungan tua dimana rasio ketergantungan tua perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk tua jenis kelamin laki-laki.

Dari angka-angka tersebut di atas terlihat bahwa penduduk produktif lebih banyak menanggung biaya hidup penduduk usia muda dengan jenis kelamin laki-laki, sedangkan tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tua dialami oleh penduduk perempuan, sementara penduduk usia produktif laki-laki lebih banyak perannya mengurus/ menanggung penduduk usia belum produktif.

Tingginya rasio ketergantungan terhadap penduduk kelompok umur muda di Kabupaten Buleleng disetiap kecamatan dan juga berdasarkan jenis kelamin dapat dijadikan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam membuat program dan kegiatan inovatif yang dapat meringankan beban mereka mengingat pengeluaran penduduk pada usia/ kelompok umur 0-14 tahun dominan untuk biaya pendidikan, gizi dan kesehatan di satu sisi dan di sisi lain yang sangat vital adalah program dengan kegiatan yang dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja.

4.1.5. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

4.1.5.1. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan pendidikan yang ditamatkan sangat dibutuhkan oleh pemerintah Daerah karena data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan disamping menunjukkan pencapaian pembangunan dengan berbagai karakteristiknya juga merupakan gambaran kualitas SDM disuatu daerah. Umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka kualitas sumberdaya manusianya semakin tinggi.

Data pada tabel 12 memperlihatkan bahwa dari 805.723 jiwa penduduk Kabupaten Buleleng di tahun 2013 sebanyak 34,69 % atau sebanyak 279.482 orang menamatkan pendidikan SD / Sederajat, selanjutnya jumlah penduduk yang tidak/ belum sekolah juga sangat tinggi mencapai 23,24 % atau sebanyak 187.276 orang. Sementara itu yang berpendidikan SLTP/Sederajat tercatat sebanyak 101.193 orang atau

sebesar 12,56 %., yang menamatkan SLTA sederajat sebanyak 146,551 orang atau 18,19 % dan yang tamat SD/Sederajat jumlahnya juga cukup tinggi yaitu 54.453 orang atau 6,76 %.

Tabel 12. Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2013.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	
		n (jiwa)	%
1	2	3	4
1	Tidak/Belum Sekolah	187,276	23.24
2	Belum Tamat SD	54,453	6.76
3	Tamat SD/Sederajat	279,482	34.69
4	SLTP/Sederajat	101,193	12.56
5	SLTA/Sederajat	146,551	18.19
6	Diploma I/II	8,502	1.06
7	Akdm/Dip. III/Sarmud	7,183	0.89
8	Diploma/Stratal	19,947	2.48
9	Strata II	995	0.12
10	Strata III	141	0.02
JUMLAH.....		805,723	100.00

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng,2013 ,Diolah

Lebih lanjut penduduk yang berpendidikan Diploma I/II sebanyak 8.502 atau 1,06 % , yang berpendidikan Akademi/Diploma/sarjana Muda sebanyak 7.183 orang atau 0,89 % , sebanyak 19,947 orang atau 2,48 % berpendidikan Diploma III/Strata I, yang berpendidikan Strata II berjumlah 995 orang atau 0,12 % dan yang berpendidikan Strata III berjumlah 141 orang atau 0,02 %.

Berdasarkan uraian tersebut didapat informasi bahwa jumlah penduduk yang Kabupaten Bulelelng di tahun 2013 termasuk penduduk yang berpendidikan rendah . Hal

tersebut tentunya akan berimplikasi pada kualitas SDM di kabupaten Buleleng dan perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah.

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan karakteristik penduduk yang berada pada wilayah itu sendiri, oleh karena itu akan menjadi penting untuk menampilkan data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan berdasarkan kecamatan.

Tabel 13: Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten Buleleng Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2013

TINGKAT PENDIDIKAN (1)	KECAMATAN								
	GRGK (2)	Seririt (3)	BSBU (4)	Banjar (5)	SKSD (6)	BLLG (7)	Sawan (8)	KBT (9)	TJKL (10)
Tidak/Belum Sekolah	13.43	13.23	6.65	11.72	9.84	17.78	9.91	7.98	9.47
Belum Tamat SD/Sederajat	9.93	18.93	8.25	11.53	10.53	13.53	11.51	6.15	9.64
Tamat SD/Sederajat	14.70	12.41	7.00	12.03	10.36	13.22	9.29	9.26	11.73
SLTP/Sederajat	11.79	12.94	9.22	13.34	9.53	17.14	9.53	7.02	9.48
SLTA/Sederajat	8.64	13.13	8.06	10.48	8.85	24.64	11.57	6.00	8.63
Diploma I/II	8.00	12.42	6.96	10.95	10.61	23.05	10.86	6.02	11.13
Akademi/Diploma III/S.Muda	6.74	13.52	6.68	9.38	7.55	33.70	9.69	4.90	7.84
Diploma IV/ Strata I	7.19	9.07	5.47	8.45	9.06	41.53	8.63	4.82	5.77
Strata II	4.42	7.04	3.92	5.43	11.66	51.76	7.24	3.82	4.72
Strata III	9.22	14.89	4.96	2.13	12.06	41.13	8.51	2.84	4.26
JUMLAH.....	12.27	13.16	7.43	11.67	9.82	17.91	10.03	7.69	10.02

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng,2013,Diolah

Berdasarkan data pada tabel 13 dapat disampaikan analisis data sebagai berikut :

1) Penduduk yang tidak / belum sekolah

Dari 23,24 % penduduk yang tidak / belum sekolah di kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang tidak / belum sekolah paling banyak ada di kecamatan Buleleng yaitu 17,78 % disusul kecamatan Gerokgak 13,43%, kecamatan Seririt 13,23 % kecamatan Banjar 11,72%, kecamatan Sawan 9,91 %, kecamatan Sukasada 9,84%, kecamatan Tejakula 9,47 %, kecamatan Kubutambahan 7,98% dan yang terendah kecamatan Busungbiu 6,65 %.

2) Penduduk yang belum tamat SD/Sederajat

Dari 6,76 % penduduk yang belum tamat SD/Sederajat di kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang belum tamat SD/Sederajat paling banyak ada di kecamatan Seririt yaitu 18,93 % disusul kecamatan Buleleng 13,53%, kecamatan Sawan 11,51 % kecamatan Banjar 11,53%, kecamatan Sukasada 10,53 %, kecamatan Gerokgak 9,93 %, kecamatan Tejakula 9,64 %, kecamatan Busungbiu 8,25 % dan yang terendah kecamatan Kubutambahan 6,15 %.

3) Penduduk yang berpendidikan tamat SD/Sederajat

Dari 34,69 % penduduk yang tamat SD/Sederajat di kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang tamat SD/Sederajat paling banyak ada di kecamatan Gerokgak yaitu 14,70 % disusul kecamatan Buleleng 13,22 %, kecamatan Seririt 12,41 % kecamatan Banjar 12,03 %, kecamatan Tejakula

11,73 %, kecamatan Sukasada 10,36 %, kecamatan Sawan 9,29 %, kecamatan Kubutambahan 9,26 % dan yang terendah kecamatan Busungbiu 7,00 %.

4) Penduduk yang berpendidikan tamat SLTP/Sederajat

Dari 12,96 % penduduk yang tamat SLTP/Sederajat di kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang tamat SLTP/Sederajat paling banyak ada di kecamatan Buleleng yaitu 17,14 % disusul kecamatan Banjar 13,34 %, kecamatan Seririt 12,94 % , kecamatan Gerokgak 11,79 %, kecamatan Sawan 9,53 %, kecamatan Sukasada 9,53 %, kecamatan Tejakula 9,48 %, kecamatan Busungbiu 9,22 %, dan yang terendah di kecamatan Kubutambahan sebesar 7,00 %.

5) Penduduk yang berpendidikan tamat SLTA/Sederajat

Dari 18,19 % penduduk yang tamat SLTA/Sederajat di kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang tamat SLTA/Sederajat paling banyak ada di kecamatan Buleleng yaitu 24,64 % disusul kecamatan Seririt 13,13 %, kecamatan Sawan 11,57 % , kecamatan Banjar 10,48 %, kecamatan Sukasada 8,85 %, kecamatan Gerokgak 8,64 %, kecamatan Tejakula 8,63 %, kecamatan Busungbiu 8,06 %, dan yang terendah di kecamatan Kubutambahan sebesar 6,00 %.

6) Penduduk yang berpendidikan tamat Diploma I / II

Dari 1,06 % penduduk yang tamat Diploma I/II di kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang tamat Diploma I/II paling banyak ada di kecamatan Buleleng yaitu 23,05 % disusul kecamatan Seririt 12,42 %, kecamatan Tejakula 11,13 % , kecamatan Banjar 10,95 % , kecamatan Sawan 10,86 % , kecamatan Sukasada 10,61 % , kecamatan Gerokgak 8,00 % , kecamatan Busungbiu 6,96 % , dan yang terendah di kecamatan Kubutambahan sebesar 6,02 %.

7) Penduduk yang berpendidikan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda

Dari 0,89 % atau 7.183 penduduk yang tamat Akademi/Diploma III/Sarjana Muda di kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang tamat Akademi/Diploma III/Sarjana Muda paling banyak ada di kecamatan Buleleng yaitu 33,70 % disusul kecamatan Seririt 13,52 % , kecamatan Sawan 9,69 % , kecamatan Banjar 9,38 % , kecamatan Tejakula 7,84 % , kecamatan Sukasada 7,54 % , kecamatan Gerokgak 6,74 % , kecamatan Busungbiu 6,68 % , dan yang terendah di kecamatan Kubutambahan sebesar 4,90 %.

8) Penduduk yang berpendidikan Strata I/Diploma IV

Dari 12.947 atau 2,48 % penduduk yang tamat Diploma IV / Strata I di kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang tamat Diploma IV / Strata I paling banyak ada di kecamatan Buleleng yaitu 41,53 % disusul kecamatan Seririt 9,07 % , kecamatan Sukasada 9,06 % , kecamatan Sawan 8,63 % , kecamatan Banjar 8,45 % , kecamatan Gerokgak 7,19 % , kecamatan

Tejakula 5,77 %, kecamatan Busungbiu 5,47 %, dan yang terendah di kecamatan Kubutambahan sebesar 4,82 %.

9) Penduduk yang berpendidikan Strata II

Dari 995 atau 0,12 % penduduk yang tamat Strata II di kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang tamat Strata II paling banyak ada di kecamatan Buleleng yaitu 51,76 % disusul oleh kecamatan Sukasada 11,66 %, kecamatan Sawan 7,24 % , kecamatan Seririt 7,04 %, kecamatan Banjar 5,43 %, kecamatan Tejakula 4,72 %, kecamatan Gerokgak 4,42 %, kecamatan Busungbiu 3,92 %, dan yang terendah di kecamatan Kubutambahan sebesar 3,82 %.

10) Penduduk yang berpendidikan Strata III

Dari 141 atau 0,02 % penduduk yang tamat Strata II di kabupaten Buleleng, jika dilihat berdasarkan kecamatan maka jumlah penduduk yang tamat Strata II paling banyak ada di kecamatan Buleleng yaitu 41,13 % disusul kecamatan Seririt 14,89 %, kecamatan Sukasada 12,06 % , kecamatan Gerokgak 9,22 %, kecamatan Sawan 8,51 %, kecamatan Busungbiu 4,96 %, kecamatan Tejakula 4,26 %, kecamatan Kubutambahan 2,84 %, dan yang terendah di kecamatan Banjar sebesar 2,13 %.

4.1.5.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.

Dengan data jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama akan diketahui karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama (Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, Khonghucu dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa)..

Kabupaten Buleleng merupakan daerah terbuka dengan karakteristik penduduk yang heterogen dari segi agama, kebudayaan, adat dan lain-lain sehingga. Dari segi agama yang di anut oleh masyarakatnya terdapat 6 jenis agama dan aliran kepercayaan. Berikut disajikan data jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut.

Tabel 14. Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng Berdasarkan Agama Yang Dianut Dirinci Berdasarkan Kecamatan Tahun 2013.

No	Kecamatan	Agama							Jumlah
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Aliran	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Gerokgak	19,953	442	98	78,286	99	-	4	98,882
2	Seririt	5,234	291	82	100,227	173	-	3	106,010
3	Busungbiu	207	139	33	59,458	24	1	8	59,870
4	Banjar	2,349	354	80	90,841	439	-	2	94,065
5	Sukasada	13,621	525	180	64,633	134	-	18	79,111
6	Buleleng	24,196	3,156	1,598	111,001	4,261	72	21	144,305
7	Sawan	782	453	84	79,426	70	-	8	80,823
8	Kubutambahan	825	222	67	60,704	118	-	9	61,945
9	Tejakula	1,619	59	36	78,978	13	-	7	80,712
	Jumlah	68,786	5,523	2,139	723,846	5,291	73	80	805,723
	%	8.54	0.69	0.27	89.84	0.66	0.01	0.01	100,00

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng,2013,Diolah

Berdasar tabel 14 dapat diketahui bahwa dari 805.723 jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng tahun 2013 sebanyak 723.846 orang atau 89,84 % menganut agama Hindu disusul pemeluk agama Islam sebanyak 68.786 orang atau 8,54 % , pemeluk agama Kristen Protestan berjumlah 5.523 orang atau 0,69% , pemeluk agama Budha berjumlah 5.291 orang atau 0,66%, pemeluk agama Kristen Katholik sebanyak 2.139 orang atau 0,27%, pemeluk agama Konghucu berjumlah 73 orang atau 0,01% dan Penganut Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa berjumlah 80 orang atau 0,01 %.

Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Hindu merupakan agama mayoritas yang dianut penduduk kabupaten Buleleng. Walaupun demikian dari segi kerukunan umat beragama di kabupaten Buleleng ,umat Hindunya tidak arogan atau menekan pemeluk agama lain sehingga terwujud kondisi keamanan yang kondusif penuh toleransi. Semua pemeluk agama dapat menjalankan ibadahnya masing-masing. Ini dibuktikan dengan telah berdirinya tempat tempat ibadah seperti Masjid sebanyak 70 buah, Langgar 47 buah Musholla 111 buah, Wihara 12 buah, Gereja 6 buah. Adanya toleransi antar umat beragama di kabupaten Buleleng tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah melalui Forum Kerukunan Umat Bersama (FKUB) maupun oleh lembaga atau tokoh-tokoh agama itu sendiri.

4.1.5.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) .

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial di kabupaten Buleleng masih diwarnai dengan banyaknya permasalahan sosial yang cukup tinggi diantaranya adalah masalah kemiskinan, masalah kecacatan, masalah keterlantaran, masalah ketunaan sosial dan masalah bencana alam dan sosial.

Data berkaitan dengan penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan dalam penyusunan program pelayanan publik yang ramah terhadap penyandang cacat.

Kabupaten Buleleng dengan jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 805.723 jiwa walapun telah banyak melakukan upaya penanggulangan masalah kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial dan masalah bencana alam, namun sampai saat ini juga belum bisa terlepas dengan permasalahan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS).

Hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2013 sebagaimana data yang tertera dalam tabel 15 menunjukkan ada 26 jenis permasalahan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS). Dari 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan social yang jumlahnya cukup banyak antara lain : anak terlantar sebanyak 1.478 orang, anak dengan kedissabilitas 761 orang, lanjut usia terlantar 5.204 orang , penyandang dissabilitas 4.285 orang, perempuan rawan social ekonomi 4264 orang, dan fakir miskin 9.131 orang.

Tabel 15. Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Buleleng Tahun 2013

No	Jenis PMKS	Satuan	Jenis Kelamin		
			L	Pr	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	Anak	170	151	321
2	Anak Terlantar (AT)	Anak	876	602	1478
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	Anak	54	2	56
4	Anak Jalanan	Anak	21	1	22
5	Anak Dengan Kedissabilitas (ADK)	Anak	447	314	761
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	Anak	0	0	0
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Anak	0	0	0
8	Lanjut Usia Terlantar	Orang	1850	3354	5204
9	Penyandang Disabilitas	Orang	2565	1720	4285
10	Tuna Susila	Orang	26	2	28
11	Gelandangan	Orang	15	3	18
12	Pengemis	Orang	2	0	2
13	Pemulung	Orang	0	0	0
14	Kelompok Minoritas	Orang	0	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	374	4	378
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	Orang	6	6	12
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	16	1	17
18	Korban Trafficking	Orang	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang	3	13	16
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Orang	20	2	22
21	Korban Bencana Alam	Orang	229	12	241
22	Korban Bencana Sosial	Orang	12	1	13
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	0	4264	4264
24	Fakir Miskin (FM)	KK	8439	692	9131
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	KK	65	9	74
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	KK	0	0	0

Sumber : Dinas Sosial Kab. Buleleng,2013,diolah.

Penyandang disabilitas sebanyak 4.285 orang tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten Buleleng terdiri dari cacat fisik, cacat netra/buta, cacat rungu/wicara, cacat

mental/jiwa, cacat ganda (fisik dan mental) serta cacat lainnya. Secara rinci jumlah penduduk penyandang cacat di kabupaten Buleleng disajikan dalam tabel 16 berikut :

Tabel 16. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kecacatan Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

No	Jenis Kecacatan	Jumlah	%
	(1)	(2)	(3)
1	CACAT FISIK	2,542	59.32
2	CACAT NETRA/BUTA	296	6.91
3	CACAT RUNGU/WICARA	334	7.79
4	CACAT MENTAL/JIWA	582	13.58
5	CACAT FISIK DAN MENTAL	531	12.39
Jumlah		4,285	100.00

Sumber : Dinas Sosial Kab. Buleleng,2013,Diolah

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel 16 tersebut di atas dapat diketahui bahwa dari 4.285 jumlah penduduk cacat, sebanyak 2.542 orang atau 59,32 % termasuk katagori cacat fisik, 582 orang atau 13,58 % cacat mental / jiwa, 531 orang atau 12,39 % cacat ganda (cacat fisik dan mental) , 334 orang atau 7,79% tuna rungu wicara dan 296 orang atau 6,91 % cacat netra / tuna netra.

Berdasarkan data tersebut di atas pemerintah daerah dapat menyusun program yang tepat sasaran .

Informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, dalam tahun 2013 telah dilakukan berbagai upaya penanganan antara lain :

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ; .
- 2) Mengusulkan penyediaan SDM sesuai dengan kebutuhan kepada Badan Kepegawaian Daerah;
- 3) Dalam rangka penanganan kemiskinan tahun 2013 di upayakan dengan memberikan pelayanan, bantuan dan perlindungan sosial melalui kegiatan :
 - a) Pemberian bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni /bedah rumah , dengan sumber anggaran dari: APBD kab. Buleleng sebanyak 48 unit, APBD Provinsi Bali sebanyak 561 unit, Kemenpera sebanyak 844 unit.
 - b) Pemberian bantuan bagi keluarga miskin melalui kegiatan :
 - Bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) keluarga fakir miskin
 - Bantuan program program keluarga harapan (PKH)
 - Bantuan asistensi sosial orang dengan kecacatan (ASSODK)
 - Bantuan asistensi sosial lanjut usia terlantar (ASLUT)
 - Program kesejahteraan sosial anak (PKSA)
 - Program lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)
 - Program penanggulangan kemiskinan lainnya melalui program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD kabupaten Buleleng .

4.1.5.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin.

Data penduduk menurut status kawin menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk dengan status kawin, belum kawin dan cerai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (de jure) maupun

tanpa pengesahan perkawinan (de facto). Indikator penduduk dengan status kawin berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan Keluarga Berencana.

Tabel 17 Distribusi Penduduk menurut Status Kawin dirinci menurut Kecamatan Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

Kecamatan	Status Kawin								Jumlah Penduduk
	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gerokgak	41,213	42.26	51,458	52.76	750	0.77	4,109	4.21	97,530
Seririt	24,623	41.01	32,105	53.48	666	1.11	2,642	4.40	60,036
Busungbiu	46,047	43.38	53,876	50.75	1,388	1.31	4,848	4.57	106,159
Banjar	39,182	41.59	49,586	52.63	982	1.04	4,471	4.75	94,221
Sukasada	35,135	44.32	39,931	50.36	973	1.23	3,245	4.09	79,284
Buleleng	68,044	47.09	68,716	47.56	1,445	1.00	6,287	4.35	144,492
Sawan	36,158	44.64	40,264	49.71	1,099	1.36	3,477	4.29	80,998
Kubutambahan	27,675	44.56	31,192	50.22	740	1.19	2,507	4.04	62,114
Tejakula	36,675	45.34	40,408	49.95	597	0.74	3,209	3.97	80,889
Kab.Buleleng	354,752	44.03	407,536	50.58	8,640	1.07	34,795	4.32	805,723

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng,2013,Diolah.

Dari tabel 17 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten yang berstatus belum kawin tercatat sebanyak 354.752 orang atau sebanyak 44,03 % dari jumlah penduduk, yang berstatus kawin sebanyak 407.536 orang atau 50,58 % dari jumlah penduduk, yang berstatus cerai hidup sebanyak 8.640 orang atau sebanyak 1,07 % dari jumlah penduduk , dan yang berstatus cerai mati sebanyak 34.795 orang atau sebanyak 4,32 % .

Jika data distribusi penduduk dengan status kawin di lihat berdasarkan kecamatan dapat disampaikan informasi sebagai berikut :

a. Penduduk dengan status belum kawin

Diantara 9 (Sembilan) kecamatan, Kecamatan Buleleng memiliki jumlah penduduk dengan status belum kawin sebanyak 68.044 orang atau 47,05 %. Angka tersebut merupakan angka tertinggi bila dibandingkan dengan kecamatan kecamatan lainnya antara lain kecamatan Sukasada 44,32% , kecamatan Seririt dengan angka sebesar 41,01 %, kecamatan Banjar sebesar 41,59 %, kecamatan Gerokgak sebesar 42,6 %, kecamatan Kubutambahan 44,56 %, kecamatan Busungbiu dengan angka 43,38 % dan kecamatan Sawan sebesar 44,64 %.

b. Penduduk dengan status kawin.

Berdasarkan data tabel 17 di atas dapat diketahui bahwa kecamatan Seririt memiliki persentase penduduk dengan status kawin sebanyak 53,48 % lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya seperti Kecamatan Gerokgak 52,76 % , Kecamatan Banjar 52,63 % dan kecamatan Buleleng sebesar 1,18 %.

c. Penduduk dengan status Cerai Hidup.

Persentase jumlah penduduk dengan status cerai hidup di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 tercatat sebanyak 8.640 orang atau sebesar 1,07 % dari jumlah penduduk. Jika angka-angka ditelusuri per kecamatan maka persentase penduduk pada status cerai hidup di kecamatan Sawan sebesar 1,36 % terlihat paling tinggi dan yang terendah ada di kecamatan Tejakula sebesar 0,74 %.

d. Penduduk dengan status Cerai Mati.

Jumlah penduduk dengan status cerai mati di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 terbanyak ada di Kecamatan Banjar dengan angka 4,75 % disusul oleh kecamatan Busungbiu 4,57 % dan kecamatan Tejakula merupakan kecamatan dengan persentase penduduk dengan status cerai mati terkecil yaitu sebesar 3,97 %.

4.1.6. Keluarga

Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih memiliki hubungan kekerabatan/ hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi keluarga antara lain :

4.1.6.1. Jumlah Keluarga Dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Rata – rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil. Rata – rata jumlah anggota keluarga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AK = \frac{\sum Pddk}{\sum KK} \times 100$$

dimana :

AK : Rata-rata jumlah anggota keluarga

$\sum Pddk$: Jumlah penduduk

$\sum KK$: Jumlah Kepala Keluarga

Tabel 18. Jumlah Penduduk, Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Keluarga Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Kk		Rata - Rata Anggota Keluarga
	N (Jiwa)	%	N (Jiwa)	%	
1	2	3	4	5	6
Gerokgak	98,882	12.27	23,113	10.27	4.28
Seririt	106,010	13.16	26,528	11.79	4.00
Busungbiu	59,872	7.43	13,796	6.13	4.34
Banjar	94,063	11.67	24,921	11.08	3.77
Sukasada	79,111	9.82	26,827	11.93	2.95
Buleleng	144,305	17.91	46,434	20.64	3.11
Sawan	80,823	10.03	23,340	10.38	3.46
Kubutambahan	61,945	7.69	20,904	9.29	2.96
Tejakula	80,712	10.02	19,091	8.49	4.23
KAB.BULELENG	805,723	100,00	224,954	100.00	3.58

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng,2013,Diolah

Berdasar data yang tersaji pada tabel 18 diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng tahun 2013 tercatat sebanyak 805.723 orang , sementara itu jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Buleleng pada akhir tahun 2013 tercatat 224.954 keluarga. Dengan angka –angka tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata anggota keluarga di

Kabupaten Buleleng sebanyak 3,58 yang artinya bahwa setiap keluarga di Kabupaten Buleleng memiliki jumlah anggota keluarga berkisar antara 3 sampai 4 orang.

4.1.6.2. Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga (SHDK).

Data hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (living arrangement) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua dan mertua termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga.

Berdasarkan database hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) akhir tahun 2013 ,disajikan data status hubungan dengan kepala keluarga (SHDK) di kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang pada tabel 19.

Berdasarkan angka angka pada table 19 di atas dinyatakan bahwa dari 204.955 kepala keluarga laki-laki sebanyak 197.946 orang masih memiliki istri, akan tetapi dari 19.999 orang kepala keluarga perempuan hanya 93 orang saja yang masih bersuami. Mengingat kepala keluarga perempuan juga membiayai anak, menantu, cucu, orangtua, atau family lain, maka angka tersebut menunjukkan betapa beban kepala keluarga perempuan cukup memprihatinkan.

Tabel 19 Distribusi Penduduk Laki Dan Perempuan Menurut Status Hubungan Dengan Keluarga (SHDK) Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

SHDK	Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepala Keluarga	204,955	51.12	19,999	4.94	224,954	27.90
Suami	93	0.02			93	0.01
Istri			197,946	48.90	197,946	24.57
Anak	181,230	45.20	157,280	38.86	338,510	42.01
Menantu	80	0.02	999	0.25	1,079	0.13
Cucu	2,030	0.51	2,004	0.50	4,034	0.50
Orangtua	5,170	1.29	13,107	3.24	18,277	2.27
Mertua	31	0.01	201	0.05	232	0.00
Familli Lain	7,158	1.79	12,889	3.18	20,047	2.50
Pembantu	24	0.01	39	0.01	63	0.00
Lainnya	192	0.05	296	0.07	488	0.10
JUMLAH	400,963	100.00	404,760	100.00	805,723	100.00

Sumber : Database Disdukcapil Kab. Buleleng,2013,Diolah

4.1.6.3. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur.

Informasi tentang kelompok umur dari kepala keluarga dan anggota keluarga sangat penting untuk diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan dan lain-lainnya. Berdasarkan database SIAK akhir tahun 2013 disajikan data kepala keluarga berdasarkan kelompok umur lima tahunan mulai kelompok umur 15-19 tahun hingga kelompok umur lebih besar dari 75 tahun di kabupaten Buleleng sebagaimana tabel berikut :

Tabel 20 Distribusi Kepala Keluarga menurut Kelompok Umur dan Status Kawin Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

Kelompok Umur	Jumlah KK	% Total
(1)	(2)	(3)
15-19	509	0.23
20-24	7,386	3.28
25-29	20,074	8.92
30-34	30,193	13.42
35-39	29,792	13.24
40-44	29,977	13.33
45-49	23,759	10.56
50-54	21,334	9.48
55-59	17,978	7.99
60-64	14,115	6.27
65-69	10,383	4.62
70-74	9,465	4.21
>=75	9,989	4.44
	224,954	100

Sumber : Database Disdukcapil Kab.Buleleng, 2013, Diolah.

Dari table 20 dapat diketahui bahwa persentase kepala keluarga terbanyak di kabupaten Buleleng berada pada kelompok umur 30 -34 tahun yaitu 13,42 %. Jumlah tersebut hanya berbeda sedikit dengan kepala keluarga yang ada pada kelompok umur 35 – 39 tahun sebesar 13,24 % dan kepala keluarga pada kelompok umur 40 – 44 tahun yaitu sebanyak 13,33 %.

Yang menarik adalah adanya kepala keluarga pada kelompok umur 15 – 19 tahun, walau jumlahnya mencapai 509 kepala keluarga (0,23%) namun sebagaimana kita ketahui bahwa penduduk pada kelompok umur tersebut merupakan masa / usia sekolah pada tingkat SLTA hingga perguruan tinggi. Jika mereka mereka tersebut ada pada usia 15-17

tahun maka dapat dipastikan mereka berhenti menuntut ilmu pendidikan. Itu adalah angka yang terlupakan dan terekam dalam database kependudukan, akan tetapi dilapangan angka tersebut mungkin lebih banyak. Oleh karena itu angka tersebut harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten Buleleng.

Disamping adanya kepala keluarga pada kelompok umur 15-19 tahun, yang menarik dari data pada table 20 di atas adalah adanya kepala keluarga yang berumur 75 tahun ke atas sebanyak 9.989 orang.

4.1.6.4. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebagaimana umumnya di Indonesia dan di Kabupaten Buleleng pada khususnya, masih ada adigium bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga padahal dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan hidupnya meninggal, cerai atau sebab-sebab lainnya.

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan. Persentase kepala keluarga jenis kelamin perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian, baik tingkat perceraian hidup maupun cerai mati di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Berikut disajikan data jumlah Kepala Keluarga berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Buleleng dirinci berdasarkan kecamatan.

Tabel 21 Jumlah Kepala Keluarga Jenis menurut Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2013

No	Kecamatan	Kepala Keluarga				Jumlah	
		Laki		Perempuan		n	%
		n	%	n	%		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gerokgak	21,698	93.88	1,415	6.12	23,113	10.27
2	Seririt	23,776	89.63	2,752	10.37	26,528	11.79
3	Busungbiu	12,953	93.89	843	6.11	13,796	6.13
4	Banjar	22,570	90.57	2,351	9.43	24,921	11.08
5	Sukasada	24,574	91.60	2,253	8.40	26,827	11.93
6	Buleleng	41,778	89.97	4,656	10.03	46,434	20.64
7	Sawan	20,324	87.08	3,016	12.92	23,340	10.38
8	Kubutambahan	19,418	92.89	1,486	7.11	20,904	9.29
9	Tejakula	17,864	93.57	1,227	6.43	19,091	8.49
	Jumlah	204,955	91.11	19,999	8.89	224,954	100.00

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng,2013,Diolah

Dari tabel 21 dapat diketahui jumlah kepala keluarga laki-laki di Kabupaten Buleleng mencapai jumlah 204.955 orang atau sebesar 91,11 % , sedangkan jumlah kepala keluarga perempuan tercatat sebanyak 19.999 orang atau sebesar 8,89 % . Walaupun angka persentase kepala keluarga perempuan hanya 8,89 % akan tetapi angka tersebut dapat menggambarkan tingkat perceraian yang terjadi di kabupaten Buleleng, baik cerai hidup ataupun cerai mati . Oleh karena itu upaya peningkatan taraf hidup keluarga dengan kepala keluarga berjenis kelamin perempuan perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat rata-rata jumlah anggota keluarga per Kepala Keluarga di Kabupaten Buleleng mencapai angka 3-4 orang

Program pemberdayaan perempuan perlu menyoar kepala Keluarga tersebut sehingga angka partisipasi sekolah di Kabupaten Buleleng dapat ditingkatkan. Untuk itulah maka data jumlah KK perempuan dimasing-masing kecamatan sangat penting dijadikan acuan dalam penyusunan program kegiatan pembangunan di Kabupaten Buleleng dan masing-masing Kecamatan.

Jika karakteristik KK perempuan tersebut dilihat berdasarkan kecamatan, terlihat bahwa jumlah KK perempuan tertinggi ada di Kecamatan Sawan sebanyak 12,92 % disusul oleh kecamatan Seririt sebesar 10,37 % kecamatan Buleleng sebesar 10,03 % dan yang terendah ada di kecamatan Busungbiu sebesar 6,11 %.

4.1.6.5. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Dalam konsep demografi, kepala keluarga merupakan seseorang baik laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak yang mempunyai peran, fungsi, tanggung jawab sebagai kepala keluarga secara ekonomi maupun sosial. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang, cerai hidup maupun cerai mati.

Dengan data jumlah keluarga berdasarkan status kawin sebagaimana tertuang pada tabel 22 dapat diketahui bahwa kepala keluarga yang berstatus kawin mencapai jumlah 198.172 orang atau sebesar 88,09 % dari KK yang ada di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya kepala keluarga yang berstatus belum kawin/lajang tercatat sebanyak 4.687 orang atau sebesar 2,08 %. Persentase kepala keluarga berstatus cerai mati tercatat 7,98

% atau sebanyak 17.945 orang, dan KK berstatus cerai hidup tercatat sebanyak 4. 150 orang atau 1,84 %.

Tabel 22 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin Kabupaten Buleleng Tahun 2013

Status Kawin	Jenis Kelamin				Jumlah	
	Laki	%	Perempuan	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum Kawin	2,789	1.36	1,898	9.49	4,687	2.08
Kawin	195,406	95.34	2,766	13.83	198,172	88.09
Cerai Hidup	2,354	1.15	1,796	8.98	4,150	1.84
Cerai Mati	4,406	2.15	13,539	67.7	17,945	7.98
Jumlah	204,955	100	19,999	100	224,954	100

Sumber : Database Disdukcapil Kab.Buleleng, 2013, Diolah

4.1.6.6. Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahtraannya. Oleh karena itu data karakteristik jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Sajian data pada tabel 23 memberikan informasi bahwa dari 224.954 jumlah kepala keluarga di Kabupaten Buleleng, sebanyak 100.647 KK atau 44,74 % tamatan

Tabel 23 Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Buleleng Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2013

Pendidikan Akhir	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah KK	
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%
1	2	3	4	5	6	7
Tidak/Belum Sekolah	8,223	4.01	4,227	21.14	12,450	5.53
Belum Tamat SD	2,708	1.32	932	4.66	3,640	1.62
Tamat SD/Sederajat	90,073	43.95	10,574	52.87	100,647	44.74
SLTP/Sederajat	30,511	14.89	1,392	6.96	31,903	14.18
SLTA/Sederajat	56,765	27.70	2,157	10.79	58,922	26.19
Diploma I/II	3,746	1.83	122	0.61	3,868	1.72
Akademi/Sarmud	2,811	1.37	149	0.75	2,960	1.32
Diploma/Strata I	9,386	4.58	413	2.07	9,799	4.36
Strata II	644	0.31	30	0.15	674	0.30
Strata III	88	0.04	3	0.02	91	0.04
Jumlah	204,955	100.00	19,999	100.00	224,954	100.00

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng Desember 2013, Diolah

pendidikan Sekolah Dasar/Sederajat, selanjutnya sebanyak 58.922 orang atau 26,19 % tamatan SLTA/Sederajat, sebanyak 31.903 orang atau 14,18 % berpendidikan SLTP sederajat, yang tidak / belum Sekolah sebanyak 12.450 orang atau 5,53 %, Diploma /Strata I sebanyak 9.799 atau 4,36 %, tamatan Diploma I/II sebanyak 3.868 orang (1,72 %) , Tamatan Sarjana Muda/ Akademi sebanyak 2.960 orang atau 1,32 %, Tamatan S2 sebanyak 674 orang (0,30 %) dan Tamatan Strata III sebanyak 91 orang atau sebesar 0,04 %.

Tingkat pendidikan Kepala Keluarga sangat berpengaruh terhadap penghasilan KK, semakin tinggi tingkat pendidikan KK kemungkinan penghasilannya juga semakin tinggi sebab untuk memasuki pasar kerja sector formal dibutuhkan persyaratan tingkat

pendidikan. Oleh karena itu jika tingkat pendidikan KK tamatan SLTA , Diploma, Sarjana muda, Strata I, Strata II dan Strata III dijumlahkan, maka jumlah KK nya hanya mencapai 32,58 % atau sebanyak 83.374 KK.

Terbatasnya lapangan kerja, ketatnya persaingan kerja jelas akan berpengaruh pada lapangan kerja KK yang tidak bersekolah atau tidak tamat SD, sebab untuk memasuki lapangan usaha minimal mereka harus punya ketrampilan untuk merebut lapangan usaha informal. Oleh karena itu patut diduga bahwa mereka semua bekerja pada sektor yang tidak memerlukan skill atau hanya menjual jasa tenaga fisiknya sebagai buruh tani, buruh perkebunan atau pada industri-industri kecil. Saat ini mereka yang hanya mampu pada jenjang pendidikan SLTA saja masih sulit mencari kerja. Oleh karena itu patut diduga pula bahwa keluarga yang mempunyai pendidikan rendah akan mempunyai pendapatan yang rendah pula, sebagai akibatnya mereka akan tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya.

4.1.6.7. Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Status Bekerja.

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota keluarganya. Oleh karena itu informasi mengenai Kepala Keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga , data pada tabel 24 memberi petunjuk bahwa 92,47 % dari 224.954 kepala keluarga atau sejumlah 208.024 KK pada tahun 2013 sudah bekerja yang terdiri dari 194.470 KK laki-laki dan 13.554 KK

Tabel 24. Distribusi Kepala Keluarga menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

Status Pekerjaan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bekerja	194,470	94.88	13,554	67.77	208,024	92.47
Belum/Tidak Bekerja	5,098	2.49	2,894	14.47	7,992	3.55
Mengurus RT	372	0.18	3,191	15.96	3,563	1.58
Pelajar Mahasiswa	373	0.18	64	0.32	437	0.22
Pensiunan	4,642	2.26	295	1.48	4,937	2.19
Jumlah	204,955	100.00	19,999	100.00	224,954	100.00

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng,2013,Diolah

perempuan. Selanjutnya kepala keluarga dengan status belum bekerja tercatat sebanyak 7.992 orang atau 3,55 % , mengurus Rumah Tangga sebanyak 3.563 atau 1,58 % , sebagai pelajar/Mahasiswa sebanyak 437 orang atau 0.22 % dan KK dengan status pensiun mencapai 4.937 KK atau 2,19 %.

Jika Jumlah KK dengan status belum bekerja dan KK dengan status Pelajar/ Mahasiswa dijumlahkan maka didapat angka sebanyak 9.525 KK atau sebanyak 3,80 % . Dengan demikian bisa dipastikan bahwa KK tersebut belum memiliki penghasilan tetap dan memungkinkan memunculkan masalah-masalah social. Untuk itu perlu menjadi perhatian pemerintah daerah berkaitan dengan adanya keluarga yang dikepalai oleh

kepala keluarga yang tidak bekerja, mereka terdiri dari 6.098 KK laki-laki dan 2.894 KK perempuan.

4.2. Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk biasanya diukur dari tingkat kesehatan, pendidikan, masalah sosial dan lain sebagainya. Secara internasional kualitas pembangunan manusia diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari tingkat pendidikan (Melek huruf dan rata-rata lama sekolah), Kesehatan (angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir) serta tingkat kesejahteraan yang diukur dengan penghasilan per kapita.

4.2.1 Kesehatan.

Indikator kesehatan biasanya diukur dari kelahiran yang meliputi angka kelahiran, pemeriksaan ante dan post natal, pelayanan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, angka kesakitan dan kematian bayi serta kematian Ibu. Berikut gambaran kualitas penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2013.

4.2.1.1. Kelahiran (Fertilitas)

Kelahiran atau fertilitas merupakan salah satu indikator kualitas penduduk karena indikator-indikator kelahiran ini sangat berguna untuk menentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan sosial terutama kesejahteraan Ibu dan Anak. Kelahiran merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk disamping migrasi

masuk. Jumlah kelahiran membawa konsekuensi pada penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak yang dilahirkan seperti gizi dan kecukupan kalori, perawatan kesehatan, kebutuhan sandang dan lainnya.

Kabupaten Buleleng memiliki 20 buah Puskesmas yang tersebar pada 9 (Sembilan) kecamatan. Berdasarkan data kelahiran dari masing-masing Puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng kemudian dikelompokkan berdasarkan kecamatan, dapat disajikan data jumlah kelahiran hidup sebagai berikut.

Tabel 25. Jumlah Kelahiran Hidup dirinci berdasarkan Kecamatan Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

NO	Kecamatan *)	Lahir Hidup	
		n (jiwa)	%
		(1)	(2)
1	Gerokgak	1,403	12.49
2	Seririt	1,073	9.55
3	Busungbiu	567	5.05
4	Banjar	1,209	10.76
5	Sukasada	1,377	12.26
6	Buleleng	2,356	20.98
7	Sawan	1,163	10.35
8	Kubutambahan	988	8.80
9	Tejakula	1,096	9.76
	Jumlah	11,232	100.00

Keterangan : *). Data kecamatan diperoleh dengan mengelompokkan data kelahiran dari masing-masing Puskesmas diwilayah kecamatan yang bersangkutan.

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Buleleng, 2014, Data diolah.

Jumlah kelahiran hidup di kabupaten Buleleng tahun 2013 berdasar data pada table 25 tercatat sebanyak 11.232 kelahiran hidup. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, jumlah kelahiran hidup terbanyak terjadi di kecamatan Buleleng yaitu 2.356 kelahiran hidup atau 20,98%, diikuti oleh kecamatan Gerokgak dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak

1.403 atau 11,83%, kecamatan Sukasada sebanyak 1.377 kelahiran hidup atau sebanyak 12,26 %. Sementara itu jumlah kelahiran hidup terendah berada di kecamatan Busungbiu yaitu sebanyak 567 kelahiran hidup (5,05 %).

4.2.1.2. Rasio Anak dan Perempuan.

Rasio Anak dan Perempuan (**Child Women Ratio / CWR**) adalah perbandingan antara anak dibawah usia 5 (lima) tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia 15 – 49 tahun di suatu tempat dan waktu tertentu. Rasio ini berguna sebagai indikator fertilitas penduduk apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi.

Untuk menghitungnya digunakan rumus :

$$CWR = \frac{P_{0-4}}{P_{15-49}} \times K$$

CWR = Child Women Ratio (Rasio Anak Perempuan).

P_{0-4} = Jumlah penduduk umur dibawah 5 tahun

P_{15-49} = Jumlah penduduk perempuan umur 15 – 49 tahun

K = Konstanta = 100

Dari tabel 26 dapat diketahui bahwa angka rasio anak perempuan (*Child Women Ratio / CWR*) di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 sebesar 21,90 orang . Ini berarti pada setiap jumlah 100 orang perempuan berusia 15-49 tahun terdapat sebanyak 21,90 (dibulatkan menjadi 22) orang anak yang berusia 0-4 tahun / dibawah 5 (lima) tahun.

Tabel 26. Rasio Anak dan Perempuan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2013

Kecamatan	Perempuan	Anak	C W R
	(15 – 49) tahun	(0 – 4) tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)
Grokgak	28,326	6,347	22.41
Seririt	28,946	5,668	19.58
Busungbiu	16,492	2,017	12.23
Banjar	25,639	4,582	17.87
Sukasada	21,850	5,409	24.76
Buleleng	40,673	10,532	25.89
Sawan	22,744	5,445	23.94
Kubutambahan	17,180	4,245	24.71
Tejakula	22,382	4,869	21.75
JUMLAH	224,232	49,114	21.90

Sumber : Database SIAK Dukcapil Kab. Buleleng, 2013, diolah.

Jika dilihat berdasarkan kecamatan, angka rasio anak perempuan /CWR tertinggi berada di Kecamatan Buleleng dengan rasio sebesar 25,89 orang anak kemudian disusul oleh kecamatan Sukasada dengan rasio sebesar 24,76 orang anak, kecamatan Kubutambahan dengan rasio 24,71 orang anak dan yang terendah ada di kecamatan Busungbiu dengan rasio 12,23 orang anak.

4.2.1.3. Kematian (Mortalitas)

4.2.1.3.1. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate-IMR).

Angka kematian bayi merupakan jumlah kematian bayi yang terjadi dari sejak dilahirkan sampai dengan umur kurang dari 1 (satu) tahun. Angka kematian bayi bisa

dirinci menjadi angka kematian *neonatal* (umur 0 – 28 hari) dan angka kematian post natal (1 – 12 bulan).

Tabel 27. Jumlah Kematian Bayi Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

NO	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi (0 - 1 thn)	
		n (jiwa)	%
	(1)	(2)	(3)
1	Gerokgak	10	23.26
2	Seririt	5	11.63
3	Busungbiu	1	2.33
4	Banjar	8	18.60
5	Sukasada	5	11.63
6	Buleleng	3	6.98
7	Sawan	2	4.65
8	Kubutambahan	3	6.98
9	Tejakula	6	13.95
Jumlah		43	100.00

Keterangan : *). Data kecamatan diperoleh dengan mengelompokkan data kelahiran dari masing-masing Puskesmas diwilayah kecamatan yang bersangkutan.

Sumber : Data Dinas Kesehatan, 2013, Diolah

Berdasar data yang tertuang pada tabel 27 diperoleh informasi jumlah kematian bayi di Kabupaten Buleleng selama tahun 2013 berjumlah sebanyak 43 orang. Jumlah kematian bayi terbanyak berada di kecamatan Gerokgak yaitu sebanyak 10 orang atau 23,26 % disusul oleh kecamatan Banjar sebanyak 8 orang atau sebesar 18,60 %, kecamatan Tejakula sebanyak 6 orang atau sebesar 13,95 %, kecamatan Seririt dan Sukasada sama-sama sebanyak 5 orang atau sebesar 11,63% dan yang terendah di kecamatan Busungbiu yaitu sebesar 2,33 %.

4.2.1.3. 2. Angka Kematian Anak Balita,

Angka kematian anak dan balita merujuk pada kejadian kematian pada anak berumur 1 tahun sampai sebelum tepat berumur 5 tahun. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, angka kematian anak balita pada tahun 2012 tercatat sebesar 0,35 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2013 turun menjadi . 0,18 1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut memberi informasi bahwa pada setiap 1.000 kelahiran hidup sampai berumur tepat 5 tahun terdapat anak balita yang meninggal sebanyak 0,18 orang.

4.2.1.3.3. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian perempuan karena kehamilan, persalinan dan nifas dan bukan disebabkan oleh hal-hal lain seperti penyakit maupun kecelakaan. Untuk menghitung angka kematian ibu secara langsung dibutuhkan data ibu yang meninggal karena sebab-sebab kehamilan, persalinan dan nifas serta jumlah bayi yang dilahirkan dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng disampaikan bahwa angka kematian Ibu tahun 2013 adalah sebesar 80,13 pe (KH). Itu berarti bahwa pada setiap 100.000 ibu melahirkan terjadi kematian ibu sebanyak 80 orang. Angka tersebut lebih rendah atau telah menurun jika dibandingkan dengan angka kematian ibu tahun 2012 sebesar 88,05 per 100.000 kelahiran hidup yang berarti untuk setiap 100.000 ibu melahirkan terjadi kematian ibu sebanyak 88,05 orang.

4.2.2. Indikator Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, indikator pendidikan diklasifikasikan menurut bentuk pendidikan, yaitu (1) pendidikan umum, (2) pendidikan masyarakat dan (3) pendidikan kedinasan. Karena keterbatasan data pada Database SIAK Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka ulasan kualitas penduduk dari aspek pendidikan menggunakan data yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng. Adapun data yang akan disajikan antara lain menyangkut Angka Melek Huruf (AMH) ,Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

4.2.2.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf yang diukur adalah angka melek huruf penduduk umur 15 tahun ke atas. Makin tinggi angka melek huruf maka semakin baik tingkat pengetahuan dan mutu sumber daya manusianya.

Tabel 28. Angka Melek Huruf Kabupaten Buleleng Tahun 2010-2013

TAHUN	ANGKA MELEK HURUF (AMH)
(1)	(2)
2010	88,46
2011	88,63
2012	89,94
2013	90,53

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2013.

Berdasarkan data yang tertuang dalam table 28, pembangunan pendidikan di Kabupaten Buleleng di ukur melalui angka melek huruf tahun 2010 hingga 2012 sudah menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan, ini terlihat dari peningkatan angka melek huruf dari 88,46 pada tahun 2010 menjadi 89,94 pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 naik menjadi 90,53

Indikator angka melek huruf tersebut merupakan indikator output yang tidak dapat dicapai dengan singkat karena melibatkan penduduk baik penduduk umur muda maupun umur tua. Usaha-usaha pemerintah dalam rangka pemberantasan buta aksara baik penyediaan sarana maupun prasarana pendidikan serta keringanan biaya sekolah melalui dana BOS dapat merangsang penduduk untuk tetap menyekolahkan anak-anaknya. Akan tetapi untuk penduduk yang sudah tidak berada dalam usia sekolah diperlukan strategi dan perhatian khusus untuk dapat memberantas buta aksara. Selain itu, kemudahan akses terhadap pendidikan merupakan faktor penting dalam menekan angka buta huruf.

4.2.2.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar. Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda, namun demikian meningkatnya persentase jumlah murid bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat,

hal ini disebabkan karena ukuran perubahan jumlah murid sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikann batasan umurnya dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai pada jenjang/tingkat pendidikannya. Dengan keterbatasan data, pada profil ini analisis APK yang dilakukan hanya pada 2 (dua) jenjang/tingkat pendidikan yaitu SD dan SLTP dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{APK SD} = \left[\frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Bersekolah di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun}} \right] \times 100$$

$$\text{APK SLTP} = \left[\frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Bersekolah di SLTP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun}} \right] \times 100$$

Tabel 29. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SLTP Kabupaten Buleleng Tahun 2010 - 2013.

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (%)			
	2010	2011	2012	2013
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI/Sederajat	98,40	99,70	101,57	104,52
SMP /MTs/Sederajat	88,15	89,40	91,36	94,98

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Buleleng, 2013,diolah.

Data pada tabel 29 menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kabupaten Buleleng dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat pada tahun 2010 tercatat sebesar 98,40 %, pada tahun 2011 meningkat menjadi 99,70 % dan di tahun 2013 meningkat menjadi 104,52 %.

Jika dikaitkan dengan jenjang umur anak SD yaitu 6 – 12 tahun, APK 104,52 % mengindikasikan ada anak berusia di bawah umur 7 tahun sudah bersekolah ditingkat SD. Ini dimungkinkan karena kesadaran orang tua sebelum anaknya masuk SD terlebih dahulu memberikan kesempatan anaknya untuk masuk TK. Mulanya mereka merencanakan anaknya ikut TK 2 tahun akan tetapi karena perkembangan anaknya sangat baik maka TK nya hanya ikut 1 tahun dan langsung diteruskan sekolah di Sekolah Dasar.

Sementara itu APK untuk SLTP/MTs/sederajat Kabupaten Buleleng dari tahun 2010 hingga 2013 juga terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010 APK SLTP tercapai sebesar 88,15 % dan pada tahun 2013 sudah mencapai angka 94,98 %. Peningkatan APK tersebut disebabkan karena adanya Program Wajib Belajar 12 tahun dan kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya semakin meningkat. Bagi orang tua, merupakan kewajiban untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Namun demikian lebih rendahnya APK anak SLTP jika dibandingkan dengan APK anak SD mengindikasikan bahwa ada anak tamat SD tidak melanjutkan pendidikan ke bangku SLTP.

4.2.2.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APK menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan dengan APK. Angka Partisipasi Murni dicari dengan menggunakan rumus :

$$\text{APM SD} = \frac{\text{Jumlah Murid SD (umur 7 – 12) Th.}}{\text{Jumlah Penduduk Usia (7 – 12) Th.}} \times 100$$

$$\text{APM SLTP} = \frac{\text{Jumlah Murid SLTP (umur 13 – 15) Th.}}{\text{Jumlah Penduduk Usia (13 – 15) Th.}} \times 100$$

$$\text{APM SLTA} = \frac{\text{Jumlah Murid SLTA (umur 16 – 18) Th.}}{\text{Jumlah Penduduk Usia (16 – 18) Th.}} \times 100$$

$$\text{APM PT} = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa/I (umur 19- 24) Th.}}{\text{Jumlah Penduduk Usia (19 – 24) Th.}} \times 100$$

Tabel 30. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP, dan SLTA, PT di Kabupaten Buleleng Tahun 2010 - 2013.

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)			
	2010	2011	2012	2013
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI/Sederajat	98,25	99,30	90,09	98,24
SMP/MTs/Sederajat	68,80	69,20	71,71	94,98
SMA/SMK Sederajat	55,50	56,70	57,46	70,37
Perguruan Tinggi	46,53	47,27	47,91	

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Buleleng, 2013

Sajian data pada table 30 di atas menunjukkan persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama . APM untuk jenjang pendidikan SD Kabupaten Buleleng dari tahun 2010 hingga 2013 sangat berfluktuatif, sedangkan APM untuk jenjang pendidikan SMP, SMA dan Perguruan Tinggi menunjukkan tren menaik.

Angka APM –SD/MI/sederajat di kabupaten Buleleng pada tahun 2010 sebesar 98,25 % berarti bahwa dari 100 orang penduduk yang berusia 7-12 tahun ada 1 -2 orang yang tidak mengikuti pendidikan SD. Kondisi tersebut pada tahun 2013 belum mengalami perubahan yang berarti dengan APM sebesar 98,24 % , namun jika dibandingkan dengan APM di tahun 2012 sebesar 90,08 % maka APM ditahun 2013 menunjukkan peningkatan yang berarti .

Untuk APM - SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi persentasenya dari tahun 2010 hingga 2013 menunjukkan peningkatan yang berarti, hal tersebut tentunya merupakan indikator kemajuan dunia pendidikan di kabupaten Buleleng.

Faktor-faktor apa yang berpengaruh sehingga APM jenjang pendidikan dari SD, SMP, SLTA dan PT semakin meningkat, beberapa faktor dari banyak faktor penentunya jelas berkaitan dengan keberhasilan kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta adanya peningkatan kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya agar memiliki pendidikan yang semakin baik.

4.2.3. Ekonomi

4.2.3.1. Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

4.2.3.1.1. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Man power atau tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia (15-64) tahun yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Indikator ini berguna sebagai bahan dalam pengambilan kebijaksanaan penyusunan rencana ketenagakerjaan. Disamping itu juga berguna untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial. Penghitungan persentase tenaga kerja dapat diketahui dengan membandingkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan. Semakin besar jumlah tenaga kerja disuatu daerah maka penawaran tenaga kerja juga semakin tinggi.

Tabel 31. Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Buleleng Tahun 2013

No	Kecamatan	Tenaga Kerja	Jumlah Penduduk	% Tenaga Kerja
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Grokgak	67,698	98,882	68.46
2	Seririt	72,125	106,010	68.04
3	Busungbiu	41,131	59,872	68.70
4	Banjar	64,530	94,063	68.60
5	Sukasada	52,786	79,111	66.72
6	Buleleng	98,104	144,305	67.98
7	Sawan	54,690	80,823	67.67
8	Kubutambahan	41,474	61,945	66.95
9	Tejakula	55,661	80,712	68.96
	JUMLAH	548,199	805,723	68.04

Sumber : Database Disdukcapil Kabupaten Buleleng, 2013,diolah

Dari tabel 31 dapat diketahui dari 805.723 orang penduduk kabupaten Buleleng pada tahun 2013 sebanyak 548.199 orang atau 68,04 % merupakan tenaga kerja. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, jumlah tenaga kerja terbanyak ada di kecamatan Buleleng sebanyak 98.104 orang disusul oleh kecamatan Seririt sebanyak 72.125 orang , kecamatan Gerokgak sebanyak 67.698 orang dan yang terendah ada di kecamatan Busungbiu yakni sebanyak 41.131 orang, akan tetapi jika dilihat berdasarkan angka persentase tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk di kecamatan masing-masing, maka persentase rata-rata tenaga kerja di tiap kecamatan di kabupaten Buleleng mencapai angka 68, 04 %. Persentase tenaga kerja tertinggi berada di kecamatan

Tejakula dengan persentase mencapai 68,96 %, disusul kecamatan Banjar 68,60 % dan yang terendah ada di Kecamatan Sukasada sebanyak 66,72 %.

Tabel 32: Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

No	Jenis Kelamin	Jumlah TK	Jumlah Penduduk	% TK
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laki-Laki	272,148	400,963	67.87
2	Perempuan	276,051	404,760	68.20
	Jumlah	548,199	805,723	68.04

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng,2013,Diolah

Informasi tentang jumlah tenaga kerja menurut jenis kelamin di kabupaten Buleleng tahun 2013 tertuang pada tabel 32 . Berdasar table di atas, jumlah tenaga kerja laki-laki tercatat sebanyak 272.148 orang dan tenaga kerja perempuan tercatat sebanyak 276.051 orang, dengan demikian proporsi tenaga kerja laki-laki yaitu sebesar 67,87 % lebih rendah dibandingkan dengan proporsi tenaga kerja jenis kelamin perempuan yaitu 68,20 %.

4.2.3.1.2. Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja).

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan (menganggur) atau yang terlibat dan berusaha terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.

Tabel 33 : Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja di Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

No	Kecamatan	Angkatan Kerja	Proporsi Angker
	(1)	(2)	(3)
1	Groggak	48,489	11.63
2	Seririt	55,656	13.35
3	Busungbiu	32,489	7.79
4	Banjar	49,560	11.89
5	Sukasada	42,269	10.14
6	Buleleng	70,463	16.90
7	Sawan	43,321	10.39
8	Kubutambahan	34,480	8.27
9	Tejakula	40,213	9.64
	JUMLAH	416,940	100.00

Sumber : Database Disdukcapil Kab.Buleleng, 2013,diolah.

Tabel 33 menampilkan data jumlah dan proporsi angkatan kerja di Kabupaten Buleleng pada tahun 2013. Dari data tersebut dapat diketahui jumlah angkatan kerja di kabupaten Buleleng sebanyak 416.940 orang tersebar di 9 (Sembilan) kecamatan. Secara absolute dan persentase jumlah angkatan kerja di kabupaten Buleleng paling banyak ada di kecamatan Buleleng yaitu sebanyak 70.463 orang (16,90 %), disusul kecamatan Seririt sebanyak 55.656 orang (13,35 %), kecamatan Banjar sebanyak 49.560 orang (11,89 %) dan yang terkecil ada di kecamatan Kubutambahan sebanyak 34.480 (8,27 %).

4.2.3.1.3. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK).

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) menggambarkan banyaknya angkatan kerja yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari penduduk yang berusia 15 – 64 tahun. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 34 : Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

No	Kecamatan (1)	Tenaga Kerja (2)	Angkatan Kerja (3)	APAK (4)
1	Grogak	67,698	48,489	71.63
2	Seririt	72,125	55,656	77.17
3	Busungbiu	41,131	32,489	78.99
4	Banjar	64,530	49,560	76.80
5	Sukasada	52,786	42,269	80.08
6	Buleleng	98,104	70,463	71.82
7	Sawan	54,690	43,321	79.21
8	Kubutambahan	41,474	34,480	83.14
9	Tejakula	55,661	40,213	72.25
JUMLAH		548,199	416,940	76.06

Sumber : Database Disdukcapil Kab.Buleleng, 2013,diolah

Dari table 34 di atas dapat diketahui Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 secara keseluruhan mencapai angka 76,06 %. Hal tersebut berarti dari 548.199 jumlah tenaga kerja di Kabupaten Buleleng 76,06 % atau

sebanyak 416.940 orang adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan.

Jika dilihat menurut kecamatan, APAK terbesar terdapat di kecamatan Kubutambahan yaitu 83,14 % disusul oleh kecamatan Sukasada sebanyak 80,08 %, kecamatan Sawan 79,21 %, kecamatan Busungbiu 78,99 % dan yang terkecil ada di kecamatan Gerokgak yaitu sebesar 71,63 %.

4.2.3.1.4. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Bekerja.

Indikator ini menunjukkan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang bekerja disetiap lapangan pekerjaan. Proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan menunjukkan distribusi dan penyebaran penduduk yang bekerja di suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator ini berguna untuk membantu pemerintah daerah dalam memfokuskan kebijakan ketenagakerjaan.

Tabel 35 berikut menunjukkan proporsi jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Buleleng yang berusia produktif (15 – 64 tahun), data di ambil menurut 20 jenis pekerjaan terbanyak.

Berdasarkan table 35 didapat informasi bahwa penduduk yang bekerja di kabupaten Buleleng sebanyak 151.622 orang atau 37,37 % terserap pada pekerjaan sebagai petani/ buruh tani/pekebun/buruh perkebunan, disusul pada lapangan sebagai karyawan swasta sebanyak 100.939 orang atau 24,88 %, sebagai buruh harian lepas sebanyak 57.109 orang atau 14,08 %, sebagai wiraswasta sebanyak 35.444 orang atau 8,74 %, kegiatan perdagangan sebanyak 23.851 orang atau 5,88 % , sebagai pegawai negeri sipil (PNS)

Tabel 35 : Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH	%
	(1)	(2)	(3)
1	Petani/Pekebun/Buruh Tani/Buruh Perkebunan	151,622	37.37
2	Peternak/Buruh Peternakan	1,420	0.35
3	Nelayan/Perikanan/Buruh Perikanan	2,897	0.71
4	Karyawan Swasta	97,306	23.98
5	Karyawan Bumn	523	0.13
6	Karyawan Honorer & Kontrak	3,992	0.98
7	Buruh Harian Lepas	57,109	14.08
8	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	10,403	2.56
9	Tentara Nasional Indonesia ((TNI)	2,056	0.51
10	Kepolisian RI (POLRI)	2,085	0.51
11	Perdagangan	23,851	5.88
12	Industri	4,075	1.00
13	Transportasi	1,983	0.49
14	Wiraswasta	35,093	8.65
15	Guru	6,077	1.50
16	Dokter	236	0.06
17	Bidan	238	0.06
18	Perawat	328	0.08
19	Sopir	2,260	0.56
20	Pekerjaan Lainnya	2,147	0.53
	Jumlah Penduduk Bekerja Kab. Buleleng	405,746	100.00

Sumber : Database Disdukcapil Kab.Buleleng, 2013,diolah.

sebanyak 12.765 orang 3,15 %, di sektor industry sebanyak 4.075 orang atau 1 % dari jumlah penduduk yang bekerja.

4.2.3.1.5. Pengangguran Terbuka.

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, baik bagi mereka yang belum pernah bekerja samasekali maupun yang sudah pernah bekerja, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka

yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 36. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

No	Kecamatan	Tenaga Kerja	Angkatan Kerja	Bukan Angker	Bekerja	Tidak Bekerja	% Tingkat Pengangguran
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Gerokgak	67,698	48,489	19,209	46,324	2,165	4.46
2	Seririt	72,125	55,656	16,467	52,345	3,311	5.95
3	Busungbiu	41,131	34,489	6,642	33,578	911	2.64
4	Banjar	64,530	53,560	10,970	49,736	3,824	7.14
5	Sukasada	52,786	42,269	10,517	40,588	1,681	3.98
6	Buleleng	98,104	70,463	27,641	66,052	4,411	6.26
7	Sawan	54,690	43,321	11,369	42,479	842	1.94
8	Kubutambahan	41,474	36,480	4,996	34,703	1,777	4.87
9	Tejakula	55,661	40,213	15,448	39,941	272	0.68
	JUMLAH	548,199	424,940	123,259	405,746	19,194	4.52

Sumber : Database Disdukcapil Kab. Buleleng, 2013,diolah.

Jumlah dan persentase pengangguran terbuka di Kabupaten Buleleng tahun 2013 sebagaimana tertuang pada table 36 tercatat sebanyak 19.194 orang atau 4,52 % dari angkatan kerja sebanyak 424.940 orang. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, jumlah pengangguran terbanyak ada di kecamatan Buleleng dengan angka sebanyak 4.411 orang atau 6,26 % dari jumlah angkatan kerja, disusul oleh kecamatan Banjar dengan jumlah pengangguran sebanyak 3.824 orang atau 7,14 % dari jumlah angkatan kerja yang

ada di kecamatan Banjar. Kecamatan dengan persentase pengangguran lebih tinggi dari rata-rata kabupaten Buleleng antara lain kecamatan Seririt, Banjar dan Buleleng.

4.3. Mobilitas Penduduk

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administratif lainnya, yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Analisis tentang migrasi atau mobilitas penduduk merupakan indikator yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam profile ini indikator yang digunakan untuk menghitung arus migrasi adalah :

- 1) Migrasi Masuk (M_i)
- 2) Migrasi Keluar (M_o)

Ukuran – ukuran indikator tersebut bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu daerah merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk sekitarnya atau wilayah lainnya untuk melakukan migrasi. Sebaliknya juga menunjukkan apakah suatu daerah karena berbagai keterbatasan sumber daya, adanya tekanan atau alasan-alasan tertentu menjadi faktor pendorong bagi penduduk di wilayahnya untuk berpindah ke daerah lainnya.

4.3.1. Mobilitas Permanen

4.3.1.1. Migrasi masuk

Migrasi masuk merupakan angka yang menunjukkan banyaknya penduduk yang masuk per 1000 penduduk di suatu Kabupaten/Kota tujuan dalam waktu satu tahun.

Migrasi masuk dapat di ukur dengan rumus :

$$M_i = \frac{Mig_{masuk}}{P} \times K$$

- M_i = Angka Migrasi Risen Masuk
 Mig_{masuk} = Jumlah penduduk masuk dalam satu periode
 P = Jumlah penduduk pada periode sama
 K = Konstanta = 1000

Berdasarkan data registrasi penduduk pindah datang kabupaten Buleleng selama tahun 2013 diperoleh jumlah penduduk yang masuk untuk menetap ke kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Tabel 37. Jumlah Migrasi Masuk Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

Kecamatan	Migrasi Masuk (Org)			Jml Pddk Org	Mi
	L	P	JML		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gerokgak	147	311	458	98.882	0,46
Seririt	186	483	669	106.010	0,63
Busungbiu	45	265	310	59.872	0,52
Banjar	159	485	644	94.063	0,68
Sukasada	219	582	801	79.111	1,01
Buleleng	402	822	1.224	144.305	0,85
Sawan	135	399	534	80.823	0,66
Kubutambahan	88	307	395	61.945	0,64
Tejakula	60	276	336	80.712	0,42
Jumlah	1.441	3.930	5.371	805.723	0,67

Sumber : Data Dinas Dukcapil Kab. Buleleng,2013,Diolah

Dari tabel 37 dapat diketahui jumlah penduduk masuk / datang ke Kabupaten Buleleng dari Januari sampai dengan Desember 2013 sebanyak 5.371 orang yang terdiri dari 1.441 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan 3.930 orang perempuan. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Buleleng pada tahun 2013 sebanyak 805.723 orang di dapat Angka Migrasi Risen Masuk sebesar 0,67 yang berarti untuk setiap 1000 jumlah penduduk migrasi masuknya menyumbang angka 0,67 orang.

Mencermati angka migrasi risen masuk per kecamatan di kabupeten Buleleng terlihat bahwa angka migrasi risen masuk paling tinggi yaitu sebesar 1,01 ada di kecamatan Sukasada, disusul oleh kecamatan Buleleng dengan angka 0,85 , kecamatan Banjar sebesar 0,68, kecamatan Sawan 0,66 dan yang paling rendah yaitu kecamatan Tejakula dengan angka migrasi masuk 0,42. Dengan angka tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2013 kecamatan Sukasada, Buleleng, Seririt , Sawan merupakan daerah tujuan kedatangan penduduk pendatang.

4.3.1.2. Migrasi Keluar

Migrasi Risen Keluar (M_o) menunjukkan banyaknya migran keluar dari suatu Kabupaten/ Kota per 1.000 penduduk daerah asal dalam waktu tertentu. Migrasi Risen Keluar dihitung dengan rumus :

$$M_o = \frac{Mig_{out}}{P} \times K$$

- M_o = Angka Migrasi Risen keluar
- Mig_{out} = Jumlah penduduk keluar dalam satu periode
- P = Jumlah penduduk pada periode sama
- K = Konstanta = 1.000

Dari tabel 38 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk keluar dari Kabupaten Buleleng secara keseluruhan pada tahun 2013 berjumlah 10.310 orang yang terdiri dari 3.053 orang migrasi keluar laki-laki dan 7.257 orang migrasi keluar perempuan.

Tabel 38. Migrasi Keluar di Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

KECAMATAN	MIGRASI KELUAR (Org)			JML PDDK	Mo
	Laki	Perempuan	JML	Org	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
GEROKGAK	271	644	915	98.882	0,93
SERIRIT	322	868	1.190	106.010	1,12
BUSUNGBIU	182	594	776	59.872	1,30
BANJAR	251	675	926	94.063	0,98
SUKASADA	268	770	1.038	79.111	1,31
BULELENG	1.006	1.756	2.762	144.305	1,91
SAWAN	333	761	1.094	80.823	1,35
KUBUTAMBAHAN	234	516	750	61.945	1,21
TEJAKULA	186	673	859	80.712	1,06
JUMLAH	3.053	7.257	10.310	805.723	1,28

Sumber : Data Dinas Dukcapil Kab. Buleleng,2013,Diolah

Angka migrasi risen keluar Kabupaten Buleleng menunjukkan angka 1,28 ini berarti untuk setiap 1.000 orang penduduk di Kabupaten Buleleng jumlah penduduk yang keluar sebanyak 1,28 orang. Jika dibandingkan dengan angka migrasi risen masuk kabupaten Buleleng sebesar 0,67 maka peranan migrasi penduduk keluar terhadap perubahan jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng lebih besar jika dibandingkan

dengan penduduk masuk. Hal tersebut terjadi tentunya disebabkan oleh banyak factor salah satu diantaranya adalah karena jumlah angkatan kerja di kabupaten Buleleng cukup tinggi, masih sempitnya kesempatan kerja di dalam daerah, terbukanya kesempatan kerja di luar daerah, skil tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Buleleng tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang tersedia di Kabupaten Buleleng, dan adanya perpindahan penduduk karena perkawinan.

4.3.1.3. Angka Migrasi Netto (nett-migration/Mn)

Angka ini merupakan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi netto positif, sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi netto negatif.

Berdasarkan data tabel 37 dapat diketahui jumlah penduduk masuk / datang ke Kabupaten Buleleng dari Januari sampai dengan Desember 2013 sebanyak 5.371 orang yang terdiri dari 1.441 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan 3.930 orang perempuan dan berdasarkan tabel 38 diketahui bahwa jumlah penduduk keluar dari Kabupaten Buleleng secara keseluruhan pada tahun 2013 berjumlah 10.310 orang yang terdiri dari 3.053 orang migrasi keluar laki-laki dan 7.257 orang migrasi keluar perempuan. Dengan data tersebut berarti jumlah penduduk keluar lebih besar daripada jumlah penduduk masuk dengan selisih sebanyak 4.939 orang. Itu berarti sepanjang tahun 2013 di kabupaten Buleleng terjadi **migrasi netto negatif**.

4.3.2. Mobilitas Non Permanen.

Mengingat bentuk Negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didiami oleh berbagai jenis suku, ras, agama ,dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, maka kehadiran penduduk pendatang ke Wilayah Kabupaten Buleleng merupakan suatu hal yang dapat diterima namun status dan identitas dirinya harus jelas sehingga tidak berstatus sebagai penduduk liar.

Walaupun fenomena penduduk pendatang terjadi sejak dulu, namun perhatian pemerintah Provinsi Bali umumnya dan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada khususnya terhadap penduduk pendatang mulai meningkat sejak terjadinya kasus Bom Bali I pada tahun 2001 dan Bom Bali II tahun 2004 , oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi kependudukan yang dapat mengantisipasi kepastian data tentang Jumlah dan Identitas Penduduk Pendatang di Wilayah Kab. Buleleng yang secara langsung atau tidak langsung ikut serta mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat , maka kegiatan pengawasan terhadap penduduk pendatang di Kabupaten Buleleng perlu disikapi secara serius oleh semua pihak.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan administrasi penduduk pendatang di kabupaten Buleleng dilandasi dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan penduduk pendatang antara lain :

1. Kesepakatan Bersama Gubernur Bali Dengan Bupati/ Walikota Se Bali Nomor : 153 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan Di Propinsi Bali.

2. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 72 Tahun 2003 Tentang Pendaftaran Dan Penertiban Penduduk Pendetang Di Kabupaten Buleleng.
3. Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 23 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Penduduk Pendetang Dan Orang Asing Di Kabupaten Buleleng.

Hasil rekapitulasi jumlah penduduk Pendetang Tidak Menetap yang berasal dari hasil SIDAK (Insfeksi Mendadak) Tim Gabungan yang terdiri dari unsure Dinas Dukcapil Kab. Buleleng, Trantib Kec, Desa/Kelurahan, Unsur POLRI dan TNI , Linmas dan Unsur Desa Adat selama tahun 2013 disajikan pada table 39.

Tabel 39 : Jumlah Penduduk Pendetang Tidak Menetap di Kabupaten Buleleng Tahun 2013

NO	URAIAN	Jumlah Duktang Terdata	Jumlah Pelanggaran	Bentuk Pelanggaran				
				Tanpa KTP	Tanpa KIPS	KIPS Mati	Tanpa STPPTS	STPPTS Mati
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Hasil Sidak Tim Gabungan	1,970	882	32	233	97	416	104
2	Hasil Pendataan Petugas Pengawas Duktang	2,208	499	126	217	114	18	24
	Jumlah.....	4,178	1,381	158	450	211	434	128

Sumber : Dinas Dukcapil Kab.Buleleng, 2013,diolah.

Berdasarkan data yang tertuang dalam table 39 di atas, dapat diketahui jumlah penduduk pendatang yang terdata sebanyak 4.178 orang, dengan jumlah pelanggaran sebanyak 1.381 orang atau 33,05 % dengan rincian pelanggaran 158 orang tidak membawa/ tidak punya KTP, sebanyak 450 orang tidak punya KIPS (Kartu Identitas Penduduk Sementara), sebanyak 211 orang punya KIPS tetapi sudah mati, sebanyak 434

orang tidak punya STPPTS (Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara) dan 128 orang STPPTS nya mati. Dari data bentuk pelanggaran tersebut dapat diketahui penduduk pendatang tinggal sementara yang berasal dari luar provinsi Bali adalah sebanyak 804 orang , mereka adalah penduduk pendatang yang belum punya KIPS , punya KIPS tapi sudah mati dan jumlah penduduk pendatang yang tidak punya KTP.

Sebagai tindak lanjut dari penduduk pendatang yang tidak punya KTP, Tim Sidak langsung menggiring yang bersangkutan ke Kantor Desa / Kelurahan setempat untuk dibuatkan berita acara sekaligus yang bersangkutan membuat surat pernyataan bahwa dalam kurun waktu tertentu mereka harus melengkapi dirinya dengan KTP daerah setempa. Surat pernyataan bermaterai tersebut juga ditandatangani oleh Kades/Lurah dan Babinkamtibmas setempat. Selanjutnya yang bersangkutan dibawah pengawasan Babinkamtibmas dan Babinsa setempat.

Hal menarik yang diperoleh dari lapangan (hasil sidak dari rumah kerumah penduduk) adalah banyaknya duktang dari luar provinsi Bali yang berjenis kelamin perempuan yang bekerja pada warung-warung minuman dan kafe-kafe yang tersebar di Kecamatan Buleleng, Sukasada, Sawan, Seririt dan Gerokgak. Kenyataan ini telah menimbulkan kekawatiran sebagian besar masyarakat Buleleng akan tingginya angka AIDS dan masalah-masalah social lainnya. Oleh karena itu pemerintah Daerah bersama-sama instansi terkait lainnya perlu duduk bersama mencari solusi agar dampak negative penduduk pendatang yang bekerja pada kafe-kafe dapat diminimalkan.

BAB V

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen Kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian wajib dimiliki oleh Penduduk Indonesia karena dokumen tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Akta kelahiran misalnya menunjukkan hubungan perdatya dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian menunjukkan hubungan perdata dengan ahli warisnya, demikian juga akta-akta lainnya. Kepemilikan dokumen kependudukan selain mempunyai kekuatan legal juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sementara bagi pemerintah akan sangat bermanfaat dalam segala bidang kegiatan pembangunan terutama dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk , pelayanan publik dan memperkuat database penduduk.

5.1. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh Keluarga. Kartu Keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Oleh karena itu KK merupakan identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, pendidikan. Untuk menghindari kepala keluarga ganda maka perempuan bisa menjadi

kepala keluarga karena status perkawinannya janda atau karena menjadi istri kedua dan sterusnya dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istrinya sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut.

Tabel 40. Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

NO	Kecamatan	Jumlah KK	YANG SUDAH PUNYA KK			%	Belum Punya KK	%
			L	P	L+P			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	GEROKGAK	23,113	19,258	1,805	21,063	91.13	2,050	8,762
2	SERIRIT	26,528	21,881	2,959	24,840	93.64	1,688	2,113
3	BUSUNGBIU	13,796	10,765	1,049	11,814	85.63	1,982	11,119
4	BANJAR	24,921	21,222	1,989	23,211	93.14	1,710	18,287
5	SUKASADA	26,827	22,887	1,541	24,428	91.06	2,399	1,586
6	BULELENG	46,434	36,749	4,450	41,199	88.73	5,235	2,621
7	SAWAN	23,340	19,386	1,031	20,417	87.48	2,923	7,607
8	KUBUTAMBAHAN	20,904	18,204	985	19,189	91.80	1,715	10,779
9	TEJAKULA	19,091	16,909	1,288	18,197	95.32	894	3,968
JUMLAH		224,954	187,261	17,097	204,358	90.84	20,596	7,602

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng, Desember 2013, Diolah.

Sajian data pada tabel 40 menggambarkan bahwa dari 224.954 jumlah keluarga yang ada di kabupaten Buleleng (Wajib KK), yang sudah memiliki dokumen Kartu Keluarga (Kartu KK) per 31 Desember 2013 sebanyak 204.358 keluarga atau baru mencapai 90,84 %. Jika dilihat per kecamatan, persentase kepemilikan Kartu Keluarga

tertinggi terdapat di kecamatan Tejakula mencapai angka 95,32 %, disusul oleh kecamatan Seririt dengan angka 93,64 %, Kecamatan Banjar sebesar 93,14 %, kecamatan Kubutambahan 91,80 %. Kecamatan Kubutambahan sebesar 81,34 %, kecamatan Sukasada 91,06 % kecamatan Buleleng 88,73 % kecamatan Sawan 87,48 % dan kecamatan Busungbiu sebanyak 85,63 %.

Dari data tersebut kecamatan yang memiliki persentase jumlah Kepala Keluarga yang telah memiliki dokumen Kartu Keluarga di atas angka rata-rata Kabupaten yaitu 90,84 % antara lain Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Sukasada, Kubutambahan dan Tejakula. Dengan demikian jumlah kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Busungbiu, Buleleng dan Sawan perlu ditingkatkan mengingat manfaat kepemilikan KK sangat banyak untuk urusan program kesehatan, bisnis, perbankan, dan lain-lainnya . Upaya peningkatan jumlah kepemilikan Kartu Keluarga akan memiliki dampak terhadap peningkatan kepemilikan KTP, oleh karena itu perlu diupayakan kegiatan penyuluhan kepada para penyelenggara administrasi kependudukan di tingkat Desa/ Kelurahan dan masyarakat secara luas melalui berbagai media penyuluhan seperti melalui tatap muka, radio, spanduk, baliho, stiker, banner dan lain-lain media.

5.2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

KTP Elektronik atau e-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK

merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;
2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;
3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;
4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana).
5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;

6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Manfaat e-KTP yang ingin dicapai adalah sebagai identitas jati diri tunggal, tidak dapat dipalsukan, tidak dapat digandakan, dan dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada. Untuk itu e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design. Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.

Mengapa harus e-KTP ?. Hal tersebut (e-KTP) dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara KTP-nya. Beberapa diantaranya telah digunakan untuk menduplikasi menghindari pajak, pembuatan paspor palsu, mengamankan korupsi, menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris).

Dengan memiliki e-KTP penduduk yang bersangkutan akan dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan ke legalitasan seseorang serta memudahkan

penduduk memperoleh layanan sosial dan ekonomi dasar lainnya seperti urusan sertifikat tanah, mengurus perkawinan, mencari pekerjaan, urusan perbankan dan sebagainya.

Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk, dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ KTP} = \frac{\sum \text{Pddk memiliki KTP}}{\sum \text{Pddk Wajib KTP}} \times 100 \%$$

Tabel 41. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

NO	KECAMATAN	WAJIB KTP			YANG SUDAH PUNYA KTP			%
		L	P	L+P	L	P	L+P	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	GEROKGAK	35.227	35.830	71.057	18.214	15.010	33.224	46,76
2	SERIRIT	50.958	53.050	104.008	31.729	30.078	61.807	59,43
3	BUSUNGBIU	38.624	40.589	79.213	21.241	19.166	40.407	51,01
4	BANJAR	27.298	28.762	56.060	18.072	15.471	33.543	59,83
5	SUKASADA	34.654	35.575	70.229	19.559	16.378	35.937	51,17
6	BULELENG	21.714	22.459	44.173	13.799	12.141	25.940	58,72
7	SAWAN	28.557	30.463	59.020	16.828	15.455	32.283	54,70
8	KUBUTAMBAHAN	22.019	23.317	45.336	12.074	10.040	22.114	48,78
9	TEJAKULA	29.657	29.428	59.085	15.640	13.261	28.901	48,91
JUMLAH		288.708	299.473	588.181	167.156	147.000	314.156	53,41

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng,2013,Diolah

Pada tabel 41 menyajikan data penduduk wajib KTP dan Jumlah penduduk yang sudah punya KTP tahun 2013 . Informasi penting yang dapat di sampaikan dari data tersebut adalah dari 588.181 orang penduduk wajib KTP, yang sudah memiliki KTP sebanyak 314.156 orang atau 53,41 %. Kecamatan dengan prosentase penduduk yang telah memiliki KTP terbanyak ada di Kecamatan Banjar dengan angka 59,83 % disusul

oleh Kecamatan Seririt 59,43 %, kecamatan Buleleng 58,72 %, kecamatan Sawan 54,70 %. Kecamatan lainnya seperti kecamatan Gerokgak, Busungbiu, Sukasada, Kubutambahan dan Tejakula persentase kepemilikan KTPnya rata dibawah 53,41 %.

Upaya peningkatan kepemilikan KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Camat, Lurah/Kepala Desa dengan system jemput bola kedesa-desa, sekolah-sekolah, fasilitas-fasilitas umum, diharapkan dapat meningkatkan kepemilikan KTP di Kabupaten Buleleng.

5.3. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia karena akta merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian.

5.3.1. Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya sebab dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan hanya

akan dicantumkan nama ibunya sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

Persentase kepemilikan akta kelahiran berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran, dapat dihitung dengan rumus :

$$\% AL = \frac{\sum Pddk_{memiliki AL}}{\sum Penduduk} \times 100 \%$$

Tabel 42. Jumlah Penerbitan Akte Kelahiran di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Kecamatan Tahun 2013.

No	Kecamatan	Jumlah penerbitan Akta Kelahiran		
		L	P	L+P
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gerokgak	2,988	2,464	5,452
2	Seririt	2,066	1,793	3,859
3	Busungbiu	1,021	983	2,004
4	Banjar	1,685	1,552	3,237
5	Sukasada	2,129	1,888	4,017
6	Buleleng	3,147	2,645	5,792
7	Sawan	2,417	2,028	4,445
8	Kubutambahan	2,053	1,755	3,808
9	Tejakula	2,092	1,826	3,918
	Kabupaten Buleleng Tahun 2013	19,598	16,934	36,532

Sumber : Database Disdukcapil Kab.Buleleng, 2013.

Tabel 42 menampilkan data jumlah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama tahun 2013. Secara keseluruhan jumlah akta kelahiran yang terbit tercatat sebanyak 36.532 akta. Penerbitan akta kelahiran terbanyak terjadi di kecamatan Buleleng dengan jumlah 5.792 akta kelahiran, kemudian disusul oleh kecamatan Gerokgak dengan jumlah 5.452 akta kelahiran, kecamatan Sukasada dengan jumlah 4.445 akta kelahiran, kecamatan Sukasada dengan jumlah 4.017 akta kelahiran, kecamatan Tejakula dengan jumlah 3.918 akta kelahiran, kecamatan Seririt dengan jumlah 3.859 akta kelahiran, kecamatan Kubutambahan dengan jumlah 3.808 akta kelahiran, kecamatan Banjar dengan jumlah 3.237 akta kelahiran, dan kecamatan Busungbiu dengan jumlah 2.004 akta kelahiran.

Tabel 43. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten Buleleng Tahun 2002 - 2013.

No	Tahun penerbitan akte kelahiran	Jumlah
	(1)	(2)
1	Penerbitan akta tahun 2002 - 2005	63,564
2	Penerbitan akta tahun 2006	12,833
3	Penerbitan akta tahun 2007	20,502
4	Penerbitan akta tahun 2008	28,674
5	Penerbitan akta tahun 2009	22,015
6	Penerbitan akta tahun 2010	22,980
7	Penerbitan akta tahun 2011	23,803
8	Penerbitan akta tahun 2012	21,092
9	Penerbitan akte tahun 2002 - 2012	215,463
10	Penerbitan akte tahun 2013	36,532
11	Penerbitan akte tahun 2002 - 2013	251,995
12	Jumlah Penduduk Kab.Bllg Tahun 2013	805,723
13	% Kepemilikan Akta Kelahiran.....	31.28

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, 2013

Jika data tersebut ditambahkan dengan data registrasi jumlah akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sejak tahun 2002 – 2012 sebanyak 215.463 akta kelahiran, maka jumlah akta kelahiran yang telah dikeluarkan dari tahun 2002 sampai dengan akhir tahun 2013 berjumlah 251.995 akta kelahiran. Dengan jumlah penduduk kabupaten Buleleng pada tahun 2013 sebanyak 805.723 orang, maka jumlah penduduk kabupaten Buleleng yang telah memiliki akta kelahiran baru mencapai angka 31,28 %.

Jumlah tersebut tentunya merupakan persentase yang masih kecil mengingat akta kelahiran wajib dimiliki oleh setiap penduduk warga negara Indonesia. Walaupun berbagai upaya telah dilaksanakan agar prosentase kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Buleleng terus meningkat dari tahun ke tahun, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng masih harus terus bekerja keras agar semakin banyak penduduk yang memiliki akta kelahiran. Penyuluhan yang selama ini dilakukan melalui tatap muka, baru menyasar aparatur di Kecamatan dan Desa dan para bendesa adat, sarasanya perlu diperluas kepada masyarakat secara langsung dan tidak langsung melalui brosur dan radio. Pelayanan akta masal melalui system jemput bola ke desa-desa selama ini sudah berjalan baik juga masih perlu ditingkatkan frekuensinya. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan dana operasional, sarana mobilitas dan jumlah tenaga yang memadai, sebab pelayanan di kantor pelayanan juga harus tetap berjalan. Hal lain yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah kemudahan dalam persyaratan dan proses penerbitan akta kelahiran, mendekatkan pelayanan akta kelahiran di Kecamatan dengan membentuk

UPTD terutama pada kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat layanan seperti Kecamatan Gerokgak, Busungbiu , Kubutambahan dan Tejakula.

Dari segi regulasi, upaya peningkatan jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Buleleng sangat dimungkinkan terlebih dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada regulasi terbaru tersebut terdapat berbagai ketentuan yang memberikan kemudahan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan mulai dari pemerintah Desa, Kecamatan sampai pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selaku penerbit dokumen kependudukan. Beberapa diantaranya adalah ketentuan pada pasal 79A yang menyatakan bahwa “ Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis), kemudian penerbitan Akta Kelahiran yang pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) tahun semula memerlukan penetapan Pengadilan Negeri , melalui pasal 32 ayat 2 persyaratan tersebut dihapus , sebagai gantinya cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota setempat. Kemudahan lainnya yang diberikan kepada masyarakat saat ini adalah tentang Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa sudah diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk. Berbagai kemudahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan animo masyarakat untuk mengurus akta kelahiran.

5.3.2. Akta Perkawinan

Akta Perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Persentase kepemilikan akta perkawinan berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan, dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ AK} = \frac{\sum Pddk_{\text{memiliki AK}}}{\sum Pddk_{\text{berstatus kawin}}} \times 100 \%$$

Tabel 44 Jumlah Penerbitan Akte Perkawinan Kabupaten Buleleng Berdasarkan Kecamatan Tahun 2013.

No	Kecamatan	Jumlah penerbitan Akte Perkawinan
	(1)	(2)
1	Gerokgak	2,235
2	Seririt	1,267
3	Busungbiu	763
4	Banjar	1,126
5	Sukasada	975
6	Buleleng	1,822
7	Sawan	1,625
8	Kubutambahan	1,717
9	Tejakula	1,130
	Kabupaten Buleleng Tahun 2013	12,660

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, 2013

Berdasarkan Tabel 44 di atas jumlah akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama tahun 2013 tercatat sebanyak 12.660 akta perkawinan. Penerbitan akta perkawinan terbanyak terjadi di kecamatan Gerokgak dengan jumlah 2.235 akta, kemudian disusul oleh kecamatan Buleleng dengan jumlah 1.822 akta, kecamatan Kubutambahan dengan jumlah 1.717 akta, kecamatan Sawan dengan jumlah 1.625 akta, kecamatan Seririt dengan jumlah 1.267 akta, kecamatan Tejakula dengan jumlah 1.130 akta, kecamatan Banjar dengan jumlah 1.126 akta, kecamatan Sukasada dengan jumlah 975 akta, dan kecamatan Busungbiu dengan jumlah 763 akta perkawinan.

Tabel 45 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akte Perkawinan Penduduk Berstatus Kawin di Kabupaten Buleleng Tahun 2002 - 2013

No	Tahun penerbitan akte Perkawinan	Jumlah
	(1)	(2)
1	Penerbitan akta tahun 2002 - 2005	23,207
2	Penerbitan akta tahun 2006	4,499
3	Penerbitan akta tahun 2007	7,039
4	Penerbitan akta tahun 2008	9,363
5	Penerbitan akta tahun 2009	6,808
6	Penerbitan akta tahun 2010	6,392
7	Penerbitan akta tahun 2011	6,310
8	Penerbitan akta tahun 2012	12,845
9	Jumlah Penerbitan akte tahun 2002 - 2012	76,463
10	Jumlah Penerbitan akte tahun 2013	12,660
11	Jumlah Penerbitan akte tahun 2002 - 2013	89,123
12	Jumlah Penduduk Status Kawin Kab.Bllg Tahun 2013	198,172
13	% Kepemilikan Akta Perkawinan.....	44.97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, 2013

Jika data tersebut ditambahkan dengan data registrasi jumlah akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sejak

tahun 2002 – 2012 sebanyak 76.463 akta perkawinan sebagaimana data yang tertuang pada table 45 di atas , maka jumlah akta perkawinan yang telah dikeluarkan dari tahun 2002 sampai dengan akhir tahun 2013 berjumlah 89.123 akta perkawinan. Dengan jumlah penduduk yang berstatus kawin kabupaten Buleleng pada tahun 2013 sebanyak 198.172 orang, maka jumlah penduduk kabupaten Buleleng yang telah memiliki akta perkawinan baru mencapai 44,97 %.

Berdasarkan angka-angka tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan jumlah kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk berstatus kawin di Kabupaten Buleleng tingkat kesadaran penduduk tetap perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan di kecamatan dan desa-desa yang melibatkan pengurus Desa Adat dan Desa Dinas bahkan juga masyarakat dalam arti luas, hal tersebut sangat penting mengingat saat ini di kalangan masyarakat di Kabupaten Buleleng sebagian besar dari mereka baru mengurus akta perkawinan jika anak-anaknya membutuhkan akta kelahiran.

Pelaksanaan pelayanan akta jemput bola ke desa-desa melalui program akta massal yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bueleleng di tahun 2013 terus ditingkatkan dan terbukti merupakan cara yang paling efektif meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun demikian dilapangan banyak dijumpai keadaan dimana pasangan suami istri belum dapat membuat akta perkawinan karena harus melengkapinya dengan putusan pengadilan dan mereka mengatakan tidak mampu menyediakan biaya yang cukup besar untuk mengurusnya di kantor pengadilan.

5.3.3. Akta Perceraian

Akta perceraian wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup atau cerai mati. Persentase kepemilikan akta perceraian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta perceraian, dan dapat dihitung dengan rumus :

$$\% AC = \frac{\sum Pddk_{memiliki AC}}{\sum Pddk_{berstatus cerai}} \times 100 \%$$

Tabel 46 Jumlah Penerbitan Akte Perceraian di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Berdasarkan Kecamatan.

No	Kecamatan	Jumlah penerbitan Akte Perceraian
	(2)	(2)
1	Gerokgak	9
2	Seririt	21
3	Busungbiu	10
4	Banjar	25
5	Sukasada	30
6	Buleleng	65
7	Sawan	22
8	Kubutambahan	10
9	Tejakula	9
	Kabupaten Buleleng Tahun 2013	201

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kab. Buleleng, 2013

Menyimak angka jumlah penerbitan akta perceraian di Kabupaten Buleleng sebagai tabel 46 di atas terlihat bahwa proses perceraian yang syah secara hukum yang sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah diterbitkan akta perceraiannya selama tahun 2013 tercatat sebanyak 201 peristiwa. Dari jumlah tersebut terbanyak ada di kecamatan Buleleng dengan penerbitan sebanyak 65 akta perceraian, kemudian disusul kecamatan Sukasada dengan 30 akta perceraian, kecamatan Banjar 25 akta perceraian, kecamatan Sawan 22 akta perceraian, kecamatan Seririt 21 akta perceraian, kecamatan Tejakula dan kecamatan Gerokgak sama-sama dengan jumlah 9 akta perceraian, kecamatan Busungbiu 10 akta perceraian.

Tabel 47. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akte Perceraian Penduduk Berstatus Kawin di Kabupaten Buleleng Tahun 2002 - 2013

No	Tahun penerbitan akte Perceraian	Jumlah
	(1)	(2)
1	Penerbitan akta tahun 2002 - 2005	178
2	Penerbitan akta tahun 2006	67
3	Penerbitan akta tahun 2007	78
4	Penerbitan akta tahun 2008	104
5	Penerbitan akta tahun 2009	92
6	Penerbitan akta tahun 2010	122
7	Penerbitan akta tahun 2011	130
8	Penerbitan akta tahun 2012	169
9	Jumlah Penerbitan akte tahun 2002 - 2012	940
10	Jumlah Penerbitan akte tahun 2013	201
11	Jumlah Penerbitan akte tahun 2002 - 2013	1,141
12	Jumlah KK Status Cerai Kab.Bllg Tahun 2013	22.095
	% Kepemilikan Akta Perceraian.....	5,16

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng,2013,Diolah

Tabel 47 menggambarkan jumlah penduduk berstatus cerai yang memiliki akta perceraian dari tahun 2002 - 2013 sebanyak 1.141 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk berstatus cerai pada tahun 2013 sebanyak 22.095 orang maka persentase kepemilikan akta perceraian mencapai 5,16 %. Angka tersebut diperoleh dengan asumsi bahwa yang mengurus akta perceraian adalah mereka yang menyangang status cerai hidup dan cerai mati.

Masih banyaknya kepala keluarga berstatus cerai yaitu cerai hidup dan cerai mati tidak mengurus akta perceraian perlu mendapatkan perhatian yang serius. Ada fakta di tengah masyarakat bahwa banyak penduduk yang pasangannya telah meninggal tetapi belum memiliki akta perceraian, demikian juga banyak perceraian yang dilakukan secara adat tapi belum memiliki akta perceraian. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan kepemilikan akta perceraian di kabupaten Buleleng, perlu ada pemikiran dan dituangkan menjadi program dan kegiatan dan tentunya didukung dengan kemauan baik dari pihak-pihak terkait untuk memberikan kemudahan dalam penerbitan putusan pengadilan dan proses penerbitan akta perceraian terutama bagi pasangan yang mengalami cerai hidup yang telah berumur 45 tahun ke atas. Hal tersebut sangat logis dilaksanakan sebab mereka kecil kemungkinan untuk kembali kawin.

Peningkatan animo kepemilikan akta perceraian bagi kepala keluarga dengan status cerai mati yang jumlahnya mencapai 17.945 orang sangat mungkin dapat ditingkatkan kesadarannya dengan membuat program yaitu pelayanan akta kematian dan akta perceraian secara khusus. Oleh karena itu pemanfaatan data base penduduk yang berstatus cerai mati ditiap desa/kelurahan setempat sebagai langkah awal akan dapat

mempercepat pencapaian tujuan. Dengan demikian maka penduduk yang salah satu pasangannya sudah meninggal dengan surat keterangan meninggal dari desa/kelurahan setempat dapat diterbitkan akta kematian dan akta kematian tersebut digunakan sebagai dasar penerbitan akta perceraian.

5.3.4. Akte Kematian

Persentase kepemilikan akta kematian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta kematian, dapat dihitung dengan rumus :

$$\% AM = \frac{\sum Pddk_{memiliki AM}}{\sum Pddk_{mati}} \times 100 \%$$

Tabel 48 Jumlah Penerbitan Akte Kematian di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Berdasarkan Kecamatan.

No	Kecamatan	Jumlah penerbitan Akte Kematian
	(1)	(2)
1	Gerokgak	18
2	Seririt	28
3	Busungbiu	18
4	Banjar	42
5	Sukasada	44
6	Buleleng	123
7	Sawan	43
8	Kubutambahan	37
9	Tejakula	29
	Kabupaten Buleleng Tahun 2013	382

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, 2013

Tabel 48 menyajikan jumlah akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2013 sebanyak 382 akta kematian . Dilihat berdasarkan kecamatan, penerbitan akta kematian terbanyak ada di kecamatan Buleleng sebanyak 123 akta kematian , kecamatan Sukasada dengan 44 akta kematian ,kecamatan Sawan dengan 43 akta kematian , dan kecamatan dengan akta kematian paling rendah ada dikecamatan Gerokgak dan Busungbiu yaitu dengan 18 akta kematian.

Tabel 49: Jumlah Penerbitan Akte Kematian di Kabupaten Buleleng Tahun 2002- 2013.

No	Tahun penerbitan akte Kematian	Jumlah
	(1)	(2)
1	Penerbitan akta tahun 2002 - 2005	563
2	Penerbitan akta tahun 2006	165
3	Penerbitan akta tahun 2007	211
4	Penerbitan akta tahun 2008	159
5	Penerbitan akta tahun 2009	186
6	Penerbitan akta tahun 2010	243
7	Penerbitan akta tahun 2011	283
8	Penerbitan akta tahun 2012	391
9	Penerbitan akte tahun 2002 - 2012	2,201
10	Penerbitan akte tahun 2013	382
11	Penerbitan akte tahun 2002 - 2013	2,583

Sumber : Database Dukcapil Kab. Buleleng,2013,Diolah

Sementara itu berdasarkan data pada table 49 diketahui bahwa jumlah akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sejak tahun 2002 hingga 2013 baru mencapai 2.324 akta kematian. Angka tersebut tentunya merupakan angka yang cukup rendah bila dibandingkan dengan jumlah kematian penduduk tiap saat yang terjadi di tengah=tengah masyarakat. Dengan cara

yang sama seperti dimaksudkan dalam peningkatan kepemilikan akta perceraian maka kepemilikan akta kematian tentunya akan dapat ditingkatkan. Inovasi program kegiatan agar kesadaran masyarakat melaporkan peristiwa kematian anggota keluarganya semakin meningkat perlu dilakukan. Salah satunya adalah dengan menugaskan Kelian Desa Adat/ Banjar Adat atau Kelian Tempekan adat agar meneruskan data penduduk yang meninggal ke Desa Dinas , kemudian desa dinas menerbitkan surat keterangan meninggal sebagai lampiran pelaporan penduduk yang meninggal kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng. Dengan data tersebut kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng menerbitkan akta kematian sekaligus dapat meng update databasenya. Dengan cara demikian maka jumlah penerbitan akta kematian tentunya bias ditingkatkan.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Buleleng tahun 2014 ini disamping sebagai output pemanfaatan data kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kurun waktu tanggal 1 Januari 2013 hingga tanggal 31 Desember 2013 pukul 17.00 Wita sesuai dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, juga merupakan hasil pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala kabupaten sebagaimana maksud pasal 7 huruf “g” Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Data dan informasi yang disajikan dalam profil ini telah di aplikasikan pada beberapa indicator kependudukan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga diharapkan memberikan gambaran yang lebih luas dan merupakan cerminan hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian, kedepan diharapkan data-data yang terdapat dalam profil ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan karena pembangunan dilaksanakan pada intinya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk itu sendiri, sehingga segala kegiatan harus berbasiskan data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar kebijakan, program dan kegiatan semakin tepat sasaran maka data-data kependudukan yang dibutuhkan harus semakin lengkap , akurat dan valid. Dengan demikian disamping dibutuhkan dukungan data dari

SKPD terkait, hal yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat masyarakat untuk melaporkan segala peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialaminya berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga data perseorangan dan data agregat kependudukan yang tersimpan dalam data base kependudukan akan semakin up to date /valid.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialaminya mulai dari Desa, kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng disamping dari segi regulasi terbaru (UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) sudah ada beberapa kemudahan seperti pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis), penerbitan akta pencatatan sipil semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting sekarang penerbitannya dilakukan di tempat domisili penduduk, penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) tahun semula memerlukan penetapan Pengadilan Negeri sekarang cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, perlu pula berbagai terobosan seperti :

- 1) Pembentukan UPTD kecamatan dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk Kabupaten Buleleng rintisan UPT diupayakan ada di kecamatan yang jauh dari kota seperti kecamatan Tejakula, Busungbiu dan Gerokgak;

- 2) Menempatkan Petugas Registrasi yang membantu Kepala Desa/ Lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tiap desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3) Pengadaan unit kendaraan untuk mobil keliling Layanan e-KTP dan mobil keliling layanan akta catatan sipil;
- 4) Peningkatan frekuensi pelayanan akta massal jemput bola ke desa-desa;
- 5) Membuat MOU dengan Pengadilan Negeri Singaraja, MOU dengan sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, klinik-klinik bersalin untuk pelayanan akta kelahiran dan Desa Adat untuk akta kematian dan perceraian.
- 6) Pembuatan program “ MASYARAKAT BULELENG SADAR KEPEMILIKAN KTP DAN AKTA 2015 “ melalui kegiatan Gebyar yang didukung oleh seluruh komponen lapisan masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah.
- 7) Pembuatan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pelayanan.
- 8) Peningkatan frekuensi dan sasaran penyuluhan tatap langsung.
- 9) Diversifikasi metode penyuluhan melalui radio, brosur, media cetak dan website.
- 10) Membuka counter pengaduan pelayanan administrasi kependudukan .

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2012;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2012;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2012;
4. Buleleng Dalam Angka 2013, Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng.
5. Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Buleleng Tahun 2012, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng 2013.
6. Laporan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2013, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.